

BAB II

PERUBAHAN POLITIK DOMESTIK (PASCA AKHIR MEI 1998) DAN REALISASI REFORMASI PERAN SOSIAL POLITIK ABRI/TNI

2.1. Pendahuluan

Minggu ketiga Mei 1998 telah menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru, yaitu dengan 'lengsernya' Soeharto dari tahta kekuasaannya selama kurang lebih 32 tahun memerintah. Hal tersebut sekaligus telah menandai suatu perkembangan maupun perubahan yang cukup mengejutkan di tingkat politik domestik Indonesia. Perkembangan tersebut selanjutnya cukup dipertanyakan oleh berbagai pihak, baik bagi warga Indonesia umumnya maupun bagi warga asing terutama bagi mereka yang berasal dari Amerika Serikat (AS), yang selama ini merupakan '*partner*' dominan di bidang ekonomi, bisnis, dan investasi, dan secara tidak langsung turut menjadi aktor-aktor utama pendukung politik Soeharto dan rejimnya selama 29 tahun lebih (1968-1998).

Setelah peristiwa Mei 1998 atau berakhirnya kekuasaan dari penguasa dominan Orde Baru Soeharto tersebut, muncul pertanyaan utama yaitu; apakah Indonesia akan memasuki era demokrasi secara lengkap ('*a more complete democratization*'), terutama dengan berperannya seluruh lembaga politik (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) seoptimal mungkin, yang sekaligus mendukung sepenuhnya pemerintahan yang demokratis dengan dukungan peran para politisi sipil umumnya, serta berakhirnya peran dominan para anggota ABRI sebagai pelaku politik di berbagai institusi sosial politik di Indonesia -- yang sebelumnya telah menjadi gejala utama dari sistem politik Orde Baru. Adanya keinginan tersebut tampaknya bukan hanya sekedar impian belaka, tapi Marcus Mietzner menekankan bahwa hal-hal yang terkait dengan isu '*a more complete democratization*' adalah hal yang wajar dan manusiawi, karena selama ini peran politik ABRI dalam sistem politik Orde Baru tampaknya amat banyak terkait dengan isu-isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan bahkan banyak pula kasus-kasus lainnya yang tidak hanya sekedar suatu pelanggaran tapi dapat dikategorikan sebagai

penyimpangan prosedural kebijakan yang berakibat menimbulkan korban jiwa (dalam menghadapi berbagai kasus demonstrasi yang dilakukan mahasiswa).¹

Di samping itu juga banyaknya tindakan kekerasan dalam hal politik, termasuk penindasan, penangkapan yang bersifat ‘rahasia’ atau tidak adanya surat resmi penahanan, tapi ‘mereka’ dapat sewenang-wenang terutama pihak-pihak yang menjadi target operasi -- ditangkap di mana saja dan kapan saja’, serta penghilangan orang-orang yang terlibat di ranah politik Orde Baru yang berseberangan dengan rejim yang berkuasa, sehingga mengakibatkan ‘mereka’ jadi korban politik, dan banyak pula di antara mereka yang diperkirakan sudah tidak diketahui lagi apakah masih hidup atau tidak. Karena itu penekanan Marcus bahwa rakyat Indonesia demikian antusias atas suatu sistem politik yang demokratis dan dapat keluar dari ancaman penindasan peran anggota ABRI yang selama ini menjadi alat kekuasaan Orde Baru adalah amat beralasan, dan penekanan Marcus tersebut sebagaimana dikutip di bawah ini;

*‘Indonesian society is expecting and is certainly ready for a more complete democratization, thus the surprisingly swift liberalization of the political system had serious consequences for the military and its top brass. Most importantly the press began to publish articles on past human rights abuses committed by the security forces, leading to a widespread sense that the political invulnerability of the military had come to an end’.*²

2.2 Menuju Hubungan Sipil-Militer Yang Baru

Situasi ketidakpastian yang melingkupi setiap proses transisi politik sebetulnya membuat sebuah negara yang sedang menjalani demokratisasi sangat mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Pengaruh internasional dari sebuah proses demokratisasi bisa terjadi dalam beberapa bentuk: *contagion*, *control*, *consent* dan *conditionality*. *Contagion* terjadi ketika demokratisasi di sebuah negara mendorong gelombang demokratisasi di negara lain. Proses demokratisasi di negara-negara Eropa Timur setelah

¹ Marcus Mietzner /Military Politics, Islam, and the State in Indonesia From Turbulent Transition to Democratic Consolidation, Penerbit ISEAS, Singapore, 2009, hal. 197.

² *Ibid.*

Perang Dingin usai dan juga gelombang demokratisasi di negara-negara Amerika Latin pada tahun 1970-an merupakan contoh signifikan.

Mekanisme *control* terjadi ketika sebuah pihak di luar negara berusaha menerapkan demokrasi di negara tersebut. Misalnya Doktrin Truman 1947 mengharuskan Yunani untuk memenuhi beberapa kondisi untuk mendapatkan status sebagai ‘negara demokrasi’ dan karenanya berhak menerima bantuan anti komunisme dari Amerika Serikat.³

Bentuk ketiga, *consent*, terjadi ketika ekspektasi terhadap demokrasi muncul dari dalam negara sendiri karena warga negaranya melihat bahwa sistem politik yang lebih baik, seperti yang berjalan di negara demokrasi lain yang telah mapan, akan bisa juga dicapai oleh negara tersebut. Dengan kata lain, pengaruh internasional datang sebagai sebuah inspirasi yang kuat bagi warga negara di dalam negara itu. Kasus yang paling sering disebut dalam hubungannya dengan hal ini adalah reunifikasi Jerman Timur dengan Jerman Barat.⁴ Bentuk keempat dari dimensi internasional dalam proses demokratisasi adalah *conditionality*, yaitu tindakan yang dilakukan organisasi internasional yang memberi kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi negara penerima bantuan.⁵

Keempat bentuk di atas menggambarkan proses *outside-in*, dimana dorongan demokratisasi datang dari luar batas sebuah negara. Proses lain yang mungkin terjadi adalah proses *inside-out*, yaitu proses dimana negara yang

³ Laurence Whitehead, “International aspect of democratization” dalam O’Donnell, G., Schmitter, P., Whitehead, L. (eds), *Transition from authoritarian rule: prospect for democracy* (John Hopkins University Press: Baltimore, 1986), hal. 5.

⁴ Philippe C. Schmitter, “The international context of contemporary democratization”, *Stanford Journal for International Affairs*, no.2 (1993), hal. 5.

⁵ Kasus paling akhir yang masih sering diperbincangkan adalah *conditionality* yang diberlakukan oleh IMF dalam paket bantuan keuangan bagi beberapa negara, termasuk Indonesia, saat mengalami krisis ekonomi. *Conditionality* ala IMF ini menimbulkan kontroversi luas. Misalnya Martin Feldstein yang berkeyakinan bahwa *conditionality* yang diikutkan IMF dalam program bantuan keuangannya tidak relevan untuk perbaikan ekonomi negara penerima bantuan karena bersifat subyektif. Terlebih bila dilihat sebenarnya IMF dibentuk hanya dengan tujuan untuk menjaga sistem *fixed exchange rates* pada tahun 1945. Selanjutnya lihat Martin Feldstein, “Refocussing IMF”, *Foreign Affairs*, vol.77/2 (1998). Juga periksa Jeffrey Sachs, “IMF is a power unto itself”, *Wall Street Journal*, 11 Desember 1997.

tengah mengalami proses demokratisasi menggunakan diplomasi dan politik luar negeri untuk mengkonsolidasikan demokrasi. Dalam studinya mengenai bagaimana negara-negara demokrasi baru menggunakan politik luar negerinya, Alison Stanger menemukan bahwa proses transisi bisa dipertahankan arahnya ketika negara –negara demokrasi baru ‘membawa dirinya lebih dekat kepada negara-negara demokrasi yang lebih mapan’.⁶

Apakah Indonesia sebagaimana dibayangkan Marcus tersebut perlu memerhatikan pandangan rakyat umumnya? Dan apakah Indonesia memang harus digiring untuk masuk pada era perubahan yang lebih liberal lagi yaitu misalnya piak sipil secara dominan dapat ‘mengontrol’ atau ‘menjinakkan’ peran politik ABRI sehingga tidak terulang lagi kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu? Jelas kalau demikian halnya terutama menyangkut perlunya peran politik sipil yang baru, tegas, tegas, dan konsisten adalah hal-hal yang tidak mudah dan tidak seperti membalikkan tangan. Pesimisme tersebut cukup beralasan karena Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) selama di era Orde Baru amat dominan peran politiknya, dan hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal; pertama, absolutisme kekuasaan yang berada dalam satu tangan, Presiden Jenderal Besar Soeharto yang amat mengerti bagaimana mengendalikan ABRI dan peran politiknya terutama bagi kepentingan kekuasaannya.

Kedua sentralisme kekuasaan tersebut nampak jelas daripada hubungan pusat dan daerah dalam sistem politik Indonesia di masa Orde Baru. Ketiga ciri khas militerisme terutama menyangkut dominasi militer dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat telah membawa Indonesia pada jurang kehancuran.⁷ Yang dimaksud dengan jurang kehancuran tersebut, yaitu berkembangannya nilai-nilai yang tidak lagi mau berkompromi dengan nilai-nilai yang bersifat demokratis, misalnya menghargai adanya nilai-nilai yang bersifat perbedaan pandangan, menjunjung mayoritas pandangan yang datang dari rakyat banyak, dan kalau perlu mayoritas pendapat tersebut dapat diterima

⁶ Alison Stanger, “Democratization and the international system: the foreign policies of interim governments” dalam Yossi Shain dan Juan Linz (eds), *Between states: interim governments and democratic transitions* (Cambridge: Cambridge University Press, 1955), hal. 274-276.

⁷ Ikrar Nusa Bhakti, dkk (Tim peneliti PPW LIPI), *Tentara Mendamba Mitra*, Penerbit MIZAN, 1999, hal 233.

sebagai ‘panutan’ yang harus dihormati, dan dijamin implementasinya.⁸ Dalam konteks itulah kemenangan partai Golkar dari pemilu ke pemilu (1971-1997) sering dianggap belum mencerminkan hadirnya benar-benar pandangan mayoritas rakyat ditengah-tengah kehidupan politik bangsa Indonesia. Justru yang hadir dari indikasi mayoritas kursi Golkar di DPR lebih merupakan gambaran berhasilnya rejim Soeharto melakukan penggiringan mobilisasi pendapat rakyat dengan menggunakan berbagai cara (menghalalkan berbagai cara), termasuk ABRI secara efektif digunakan sebagai alat politik pemerintahan Orde Baru.

Situasi kehidupan demokratis dan ‘mayoritas’ kursi partai Golkar tersebut di DPR, masih menjadi gambaran dominannya kehidupan paham absolutisme yang ditafsirkan oleh para penguasa Orde Baru (Soeharto dan para pendukungnya), yang menunjukkan gaya pemerintahan yang masih jauh dari azas politik demokrasi yang sesungguhnya. Jelas kehidupan politik yang demikian tersebut, dan masih adanya ‘keterlibatan ABRI’ yang demikian kuat, maka wajarlah kalau sistem tersebut dianggap lebih banyak mengabaikan azas *rule of law*. Dalam sistem tersebut dapat dikatakan bahwa Soeharto telah menjadi hukum itu sendiri, karena itu berjalannya satu sistem pengadilan yang netral sangat bergantung pada kemauan Soeharto dan rejimnya, dan bukan dominan atas dasar prinsip kesetaraan hukum bagi seluruh warga negaranya⁹.

Pandangan menyangkut kehidupan demokrasi Indonesia pasca Mei 1998 yang masih sarat dengan pengaruh kekuatan ABRI tersebut juga di akui oleh William Liddle, bahwa sesungguhnya perubahan politik dari supremasi militer yang cukup kuat di bidang politik kearah politik yang bersifat demokratis bukanlah merupakan sesuatu yang mudah¹⁰. Karena untuk membangun suatu sistem yang baru, maka diperlukan suatu proses dalam bentuk kesadaran dari kedua belah pihak secara konsisten dan saling mengisi (komplementer), pihak sipil terutama para politisinya harus mempersiapkan diri SDM-nya (Sumber Daya Manusiannya) secara berkualitas dalam menduduki jabatan yang selama ini di pegang oleh para anggota ABRI, dan

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ William Liddle dalam Marcus Mietzner, *Op. Cit* (2009), hal. 195.

selanjutnya pihak ABRI umumnya juga harus bersikap ikhlas untuk mau memberi kesempatan kepada pihak sipil. Situasi tersebut tampak menjadi gejala yang dominan bagi perpolitikan Indonesia di era 1998-99, akibatnya proses peralihan politik atau dapat disebut sebagai transisi politik yang penting bagi perlunya atas 'berkurang dan berakhirnya' peran ABRI dalam sistem politik Indonesia pasca Mei 1998, diakui bukanlah suatu proses yang mudah dilalui dan memberikan hasil yang optimal yang positif bagi sistem politik Indonesia yang pada pasca Mei 1998 dapat disebut sebagai era Orde Reformasi.

Kompromi politik antara pihak-pihak politisi sipil yang menduduki jabatan penting di era kepemimpinan Presiden B. J. Habibie, dengan mereka dari pihak-pihak ABRI yang masih menduduki jabatan penting di berbagai institusi politik pemerintahan tentunya perlu dipertanyakan yaitu; langkah-langkah awal apakah yang sebaiknya dilakukan sehingga perubahan 'peningkatan peran politik sipil' tidak menimbulkan masalah atau bencana politik baru?

Hal tersebut merupakan tantangan yang cukup serius bagi pemerintahan B.J. Habibie. Dalam hal itu Presiden B. J. Habibie harus memikirkan langkah-langkah awal apa yang tepat agar proses pengalihan kekuatan politik dari ABRI ke tangan politisi sipil berjalan dengan mulus. Periode 1998/99 oleh sebagian kalangan pengamat asing maupun bagi pemerintah AS sendiri, serta publik domestik Indonesia bukanlah suatu kondisi yang mudah, dan sudah dapat dipastikan arah perkembangannya. Dalam situasi politik yang masih 'tidak menentu' tersebut, artinya belum adanya tonggak-tonggak politik yang kuat bagi berperannya para politisi sipil dan berakhirnya dwifungsi ABRI merupakan perkembangan politik yang patut dipertanyakan. Politik apa yang dilakukan Presiden Habibie pada 1998/99, menurut Marcus – Habibie menekankan prinsip politik yang bersifat '*the politics of give and take: Habibie and TNI, 1998/99*'.¹¹ Situasi politik pada era 1998/99 tersebut menurut Marcus lebih jauh dapat dikatakan bahwa Indonesia memasuki era '*the ambivalent character of the 1998 regime change,*

¹¹ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 196-7.

*which exhibited reformative and conservative features at the same time, and had profound impact for Indonesia – especially on the development of the post-autocratic polity.*¹²

Ada 2 poin penting yang menjadi penekanan Marcus tersebut, bahwa; pertama, perkataan reformasi dalam institusi ABRI terutama menyangkut perlu diakhirinya peran dwi-fungsinya sebagai sesuatu yang tak terelakkan lagi, dan tampaknya menjadi fokus dari politik domestik yang menjadi prioritas Presiden Habibie. Kedua, perkataan proses politik yang mendua (*the ambivalent character*), hal tersebut tampaknya perlu digarisbawahi karena kendatipun reformasi dalam hal mengakhiri peran dwifungsi ABRI harus dilakukan, namun peran tokoh-tokoh ABRI yang sudah muncul dalam beberapa tahun sebelum 1998, seperti Jenderal Wiranto tidak dapat dikesampingkan atau disingkirkan begitu saja. Karena itu peran Jenderal Wiranto tetap menjadi *partner* penting bagi kepemimpinan Presiden B. J. Habibie dalam hal secara bertahap membuat Indonesia tidak lagi dalam bayang-bayang kekuatan maupun kekerasan peran politik militer masa lalu, tetapi secara konkrit menetapkan langkah-langkah yang transparan, lebih manusiawi, dan menjunjung nilai-nilai universal dalam demokrasi.

Oleh sebab itu Presiden B. J. Habibie di awal kariernya sebagai penguasa baru di Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut; “*Habibie under strong societal pressure to demonstrate his reformist credentials, launched a bold political reform programme within days of assuming office. He then decided to lift the limitations on establishing political parties, allowed unrestricted freedom of the press, and promised free and fair elections for the near future.*”¹³ Apa yang dilakukan Presiden Habibie tersebut dapat dikatakan sebagai awal dari politiknya ‘*give-Habibie*’ pada publik termasuk pada ABRI bahwa Habibie sebagai presiden telah memberi arahan politik yang jelas bahwa Indonesia pada era pasca Mei 1998 harus mengarah pada sistem politik yang demokratis yaitu siap dengan lahirnya partai-partai politik baru, kebebasan pers, dan menjanjikan suatu pemilu yang dikenal dengan istilah bebas, jujur, dan adil. Konsekuensi dari hal tersebut Presiden Habibie

¹² *Ibid.*

¹³ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 197.

tentunya bertanya yaitu hal-hal apa yang dapat dilakukan ABRI untuk mendukung perkembangan Indonesia yang demikian tersebut (partai baru, kebebasan pers, dan pemilu yang kredibel), yang dapat disebut sebagai *'what Habibie takes' from Indonesian Army Forces (ABRI)*.

Hal-hal yang menjadi arahan politik demokrasi Habibie tersebut, tampaknya tidak lepas dari kritik-kritik yang dilancarkan pihak AS maupun negara-negara Barat yang selama ini mempertanyakan 'sistem politik demokrasi' di era Orde Baru. Indonesia pasca akhir Mei 1998 tampaknya diharapkan muncul sebagai negara demokratis baru dan lengkap peran institusi sosial-politiknya, yang menjadi salah satu tuntutan penting dari kebijakan *'three in one'*-nya kebijakan Presiden AS Bill Clinton. Antisipasi yang dilakukan Habibie juga ingin memperjelas bahwa sikap Indonesia terhadap AS dan negara-negara Barat turut memperhitungkan kepentingan maupun 'tekanan pengaruh' politik ekonomi yang dilancarkan AS bersama IMF dan Bank Dunia terhadap pemerintahan Orde Baru Soeharto.

Dalam memahami konstelasi eksternal yang sudah bermuara pada sistem politik Indonesia pada 1997/98 (adanya tekanan AS, dan IMF khususnya), maka jelas di tingkat domestik yang juga diharapkan Presiden B. J. Habibie yaitu adanya dukungan ABRI/TNI terhadap kepemimpinannya. Dalam hal itu Presiden ketiga Indonesia tersebut amat mengharapkan dapat terwujudnya dukungan ABRI yang optimal baik dalam hal keamanan maupun politik nasional, agar program maupun langkah awal Presiden Habibie tersebut dapat terlaksana dengan baik, dan secara bertahap menjadi cikal bakal pada suatu perubahan formulasi politik domestik Indonesia secara menyeluruh. Dari kebijakan Presiden Habibie tersebut implikasi awalnya langsung dapat dirasakan yaitu; *'the press began to publish articles on past human rights abuses committed by the security forces, leading to a widespread sense that the political invulnerability of the military had come to an end. Moreover, political parties of all colours and ideologies sprang up between June and August 1998, colliding with the traditional military paradigm of societal control and its obsession with the perceived dangers of political pluralism. This new atmosphere of open political competition, which*

allowed all politico-ideological groups except for the communists to organize and participate in the struggle for power in the post-Suharto polity, disturbed many within the officer corps and left them in doubt about their role, function, and careers'.¹⁴

Hal-hal yang dilakukan Presiden B. J. Habibie kelihatan sederhana, namun berbagai kebijakannya itu secara politik domestik cukup merupakan 'pukulan' bagi eksistensi ABRI sebagai kekuatan politik di era Orde Baru. Kekecewaan cukup besar muncul dan dirasakan oleh para kalangan perwira aktif di ABRI yang menilai pemberitaan-pemberitaan di media massa sebagai hal yang turut menjatuhkan citra mereka. Intinya, demikian berat tantangan yang dihadapi ABRI selama ini, termasuk sebagai alat kekuasaan pemerintahan Orde Baru, namun pada pasca Soeharto Mei 1998 justru 'mereka' para perwira ABRI tersebut tidak mendapat penghargaan yang layak – dan justru sebaliknya mendapat pelecehan luas di kalangan masyarakat umumnya. Akibatnya, karier sebagai perwira militer di era Presiden B. J. Habibie tidak lagi memberika harapan besar. Intinya, pengorbanan para perwira militer ABRI tersebut cukup besar, dan nilai-nilai finansial yang relatif tidak terlalu menggiurkan, namun resikonya amat besar – yaitu semua pelaksanaan karier tersebut terutama taruhannya nyawa. Alhasil banyak perwira ABRI yang kecewa dengan awal politiknya Habibie yang segera ingin merealisasikan Indonesia dengan istilah 'demokrasi lengkapnya', yang tidak memerlukan lagi dukungan dan peran sospol TNI/ABRI.

Dalam hal itu Marcus menekankan; *'from the military perspective of self-preservation, Habibie's initiative to strengthen civilian groups and entrench them in the institutions of the new polity not only threatened to fundamentally alter the power relations in Indonesia's state structure, but also had the potential to marginalize the armed forces from political life for the first time since the late 1950s.'*¹⁵ Mungkin banyak pihak yang tidak mengetahui kalau dalam situasi Indonesia pada waktu itu yang disebut sebagai masih dalam situasi amat kuatnya pengaruh ABRI dalam politik, dan bersifat 'ambivalensis' bagi peran kekuatan politik sipil (harus meakukan perubahan

¹⁴ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 197.

¹⁵ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 197.

politik, tapi juga harus mau kompromi dengan tokoh-tokoh jenderal tertentu di ABRI), namun justru Presiden B. J. Habibie menurut Marcus melakukan; *'Habibie opted to leave the majority of Suharto's top generals in their positions. Most importantly, there was a widely held view in Habibie's circle and much of the political elite that the removal of the military hardliners (including General Prabowo Subianto) was sufficient to satisfy initial public demands for change in the armed forces.'*¹⁶

Situasi yang ambivalensis dari politik domestik Indonesia tersebut, dan tampak dari apa yang dilakukan Presiden B. J. Habibie terbukti bahwa *'personally for Habibie, that Wiranto had to be rewarded for the orderly transition of presidential power, and both men had a joint interest in preventing investigations into the benefits they had received under authoritarian rule. Consequently, Wiranto held on to his control over the armed forces and the department of defence and security, and many of his associates retained their commands or were promoted to higher offices.'*¹⁷ Karena itulah banyak pengamat yang mengatakan era politik 1998/99 dapat dikatakan sebagai dwi tunggal Habibie-Wiranto. Perkembangan tersebut memang dapat dikatakan bahwa Indonesia mendapat tekanan kuat dari Amerika Serikat, yang menginginkan adanya perubahan politik Indonesia yang menuju pada bentuk-bentuk pemerintahan yang demokratis dan tidak hanya sekedar politik kamufase dan terjadi pada era Orde Baru.¹⁸ Lebih jauh AS juga tampaknya menghendaki peran militer dan politik yang dapat dikendalikan dan di bawah pengawasan otoritas sipil, dan tidak terulang kembali terjadinya 'supremasi ABRI' masa lalu yang hanya sekedar jadi alat politik kekuasaan.¹⁹ Tekanan dan kepentingan AS terhadap munculnya suatu Indonesia yang benar-benar demokratis jelas tidak dapat diabaikan oleh siapapun yang berkuasa di Indonesia. Dalam konteks inilah faktor AS sebagai faktor eksternal yang juga ingin mengawal terwujudnya suatu reformasi yang

¹⁶ *Ibid.*, hal. 198.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Zainuddin Djafar, *Rethinking the Indonesian Crisis*, Penerbit Pustaka Jaya, Jakarta, 2006, hal.

¹⁹ *Ibid.*

sesuai dengan munculnya Indonesia sebagai negara yang ‘lengkap’ kehidupan demokrasinya, adalah harapan yang cukup serius.

Proses reformasi yang secara tidak langsung juga dialami oleh ABRI tampaknya menunjukkan hal-hal yang positif bagi kepemimpinan Jenderal Wiranto, dan khususnya sebagai Panglima ABRI. Marcus menyatakan; *‘there was a strong sense of satisfaction within Wiranto’s circle over its success in negotiating Suharto’s resignation and assuming control over the post-New Order armed forces. The compromise oriented generals had- through their manoeuvring in the last days of the regime – avoided the example of countries such as South Korea that embarked on the reform of their post-authoritarian militaries by replacing large sections of the armed forces leadership.’*²⁰ Jenderal Wiranto tampaknya dapat mengimplementasikan keinginan reformasi yang menjadi penekanan kebijakan Presiden B. J. Habibie, dan di bawah ‘sorotan’ AS dan negara-negara Barat dengan prinsip ‘*alon-alon asal klakon*’, namun tegas, dan konsisten. Ini menyebabkan perkembangan politik domestik Indonesia di bawah ‘duet Habibie-Wiranto’ tidak mendapat hambatan maupun resistensi dari pihak AS dan negara-negara Barat umumnya. Mereka (AS, dan Barat) menyadari bahwa proses reformasi maupun perubahan menyangkut peran dwi-fungsi ABRI memang tidak dapat berjalan secara revolusioner. Indonesia memang tampaknya memerlukan waktu untuk menempatkan peran ABRI yang baru di samping kehidupan politik yang demokratis secara ‘lengkap’. Karena itu, *‘by contrast the composition of Indonesia’s top brass experienced only marginal changes, allowing senior officers attached to the old regime to defend their personal interests against demands for fundamental reform. The relief in the military elite over its continued grip on key positions was offset, however, by considerable discontent with the new political system.’*²¹

Kendatipun demikian, kebijakan Habibie-Wiranto dalam hal implementasi reformasi TNI tetap dikhawatirkan oleh pihak politisi sipil. Dalam hal ini ada pihak yang memberikan nasehat pada Habibie – agar Jenderal Wiranto diganti dengan Jenderal TNI yang baru dan benar-benar

²⁰ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 198

²¹ *Ibid.*

dapat dikendalikan.²² Dalam hal ini *'a group of close confidants who frequently warned Habibie of the danger' that the military could potentially pose to his government.*²³ Presiden B. J. Habibie menolak pandangan skeptis maupun nada-nada bahwa sabotase militer terhadap agenda demokrasinya dapat terjadi sewaktu-waktu (1999). Lebih jauh Presiden B. J. Habibie; *'had decided to stick with the incumbent, apparently confident that Wiranto could be relied upon to support his democratic agenda, thus the fear over military sabotage was exaggerated.*²⁴

Presiden B. J. Habibie menyadari bahwa soal adanya kemungkinan sabotase militer tersebut, tapi yang jelas Habibie memerlukan *'partner'* Jenderal sebagai *'jembatan'* agar maksud Habibie menyangkut agenda demokrasi dapat menyakinkan pihak-pihak militer lainnya di TNI, termasuk pula upayanya agar tidak diremehkan oleh pihak militer sendiri. Hal tersebut tampaknya menjadi pertimbangan Habibie, dan peran Jenderal Wiranto yang *'toleran'* dengan ambisi politik demokrasi Habibie tidak mudah untuk digantikan oleh Jenderal TNI lainnya. Di samping sebagaimana yang disinyalir oleh Marcus bahwa *ithe new president (Habibie) had little choice to integrate the military into his institutional and personal patronage network. Rejected by key societal forces and the emerging political parties, Habibie had also to rely on the military as one of his major sources of power.*²⁵ AS dan negara Barat umumnya dapat mengerti kondisi politik domestik yang dihadapi Habibie tersebut, yang penting bagi *'mereka'* Habibie sudah punya ambisi yang sama dengan AS dan negara-negara Barat umumnya bahwa Indonesia harus memperkuat institusi politiknya secara demokratis. Selanjutnya *'mereka'* juga salut terhadap Habibie ternyata proses peralihan kekuasaan dari Soeharto pada dirinya, dan termasuk langkah-langkah awal atas proses pengakhiran dwi-fungsi ABRI dapat berjalan lancar, dan tanpa ada suatu pertentangan terbuka maupun tindakan-tindakan yang bersifat desersi dari pihak ABRI sendiri.

²² *Ibid.*, hal. 199.

²³ *Ibid.*

²⁴ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 198

²⁵ *Ibid.*, hal. 199.

Dalam hubungan itu jelas Presiden B. J. Habibie tampaknya memahami bahwa perubahan politik ke arah kehidupan politik yang demokratis tidak boleh melangkah terlalu jauh, terutama yang dapat membahayakan eksistensi ‘duet Hibibie-Wiranto’ atau ‘kolaborasi sipil-militer’. Oleh sebab itu menurut Marcus; *‘both Habibie and ABRI’s senior officers had much to fear from the political changes that would inevitably lead to greater transparency critical press reporting, and more credible legal proceeding. As former Suharto cronies, the new president and his generals shared concerns about possible investigations into their conduct under the New Order, which included illicit business deals and a long list of human rights abuses.’*²⁶

Kesatuan sikap antara ‘duet Habibie-Wiranto’ dalam mentafsirkan perubahan politik yang *tidak* membahayakan posisi mereka, tampaknya menjadi pilihan yang diprioritaskan. Karena itu setiap ancaman yang muncul dari suatu perubahan politik pasca Mei 1998, dan membahayakan kedua ‘duet politik’ tersebut tampaknya harus dihindari terutama menghadapi para pendukung Soeharto dan kroninya. Oleh sebab itu Presiden B. J. Habibie menyerahkan sepenuhnya soal-soal yang terkait dengan reformasi di bidang militer kepada Wiranto dan para penasihat/termasuk pendukungnya.²⁷

Dengan demikian pihak sipil, dan di bawah kendali Presiden B. J. Habibie khususnya mau tidak mau tidak lepas dari sebuah situasi seperti *‘surrendered authority’* (intinya otoritas dari seluruh kekuasaannya yang tidak sepenuhnya berada di tangannya sendiri), dan Presiden B. J. Habibie juga harus berbagi kekuasaannya dengan pihak Jenderal TNI Wiranto. Marcus menggambarkan situasi tersebut sebagai *berikut; ‘the civilian government surrendered authority over one of the most crucial areas of structural reform and effectively allowed the armed forces to reform themselves.’*²⁸ Pihak AS maupun negara-negara Barat yang diwakili oleh pendapat Marcus tersebut, tampaknya ‘bersikap aneh’ dengan kebijakan Presiden B. J. Habibie tersebut yang menyerahkan sepenuhnya soal reformasi tersebut kepada ABRI sendiri,

²⁶ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 200.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 200.

khususnya dalam hal itu pada pihak Jenderal TNI Wiranto dan para pendukungnya dapat melakukan apa saja.²⁹ Mereka (AS maupun negara-negara Barat) lebih jauh secara sinis menyatakan sebagai berikut; *'this is like asking a bunch of incompetent and corrupt managers to develop a new business plan for the company they had previously bankrupted.'*³⁰ Namun AS maupun negara-negara Barat lainnya tidak dapat berbuat banyak, menolak atau bahkan menentang kebijakan Presiden B. J. Habibie tersebut. Karena masih kuatnya pengaruh ABRI dan para pendukung Soeharto serta rejim Orde Baru tidak mudah bagi siapapun untuk melancarkan suatu perubahan yang bersifat cepat, dan revolusioner.

Implikasi dari sistem pemerintahan yang dibangun oleh Presiden B. J. Habibie menunjukkan bahwa selama 18 bulan tidak mempunyai keputusan maupun perintah langsung dari *penguasa* sipil terhadap elit militer menyangkut bagaimana melakukan revisi atas sistem komando militer, doktrin, dan pandangan-pandangan politiknya. Hal tersebut dinilai oleh Marcus; *'is certain to cause long-term damage to the goal of establishing democratic control over the armed forces. As would soon become evident, that was precisely what occurred in the early period of Indonesia's political transition.'*³¹

Kendatipun pihak sipil (pemerintahan Habibie) tidak mempunyai otoritas langsung 'mencampuri' ataupun melakukan reformasi terhadap interen ABRI, namun akhirnya dengan *'penafsirannya'*, Jenderal Wiranto pada Juli 1998 menciptakan sebuah paradigma baru yang dianggap sebagai konsep baru bagi reformasi di ABRI antara lain; *'first, the military was content not to be in the forefront of all national affairs; second, the previous approach of occupying was changed into influencing, third, this influence was to be exerted indirectly rather than directly; and fourth, the armed forces acknowledged the necessity for role-sharing with other national forces.'*³² Berdasarkan hal-hal tersebut bukanlah berarti semua perwira di kalangan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 201.

³² *Ibid.*

Angkatan Darat bersikap puas, dan positif. Karena menurut Jenderal reformis Agus Wirahadikusmah, bahwa hal-hal yang menjadi pernyataan Jenderal Wiranto tersebut bukanlah sesuatu yang baru, dan hal-hal tersebut sudah pernah menjadi ide-ide Soeharto untuk melakukan perubahan intern ABRI sebelum berakhir kekuasaannya.

Selanjutnya pada November 1998 suatu kebijakan penting dilakukan oleh Jenderal Wiranto, bahwa sejak Januari 1999 fraksi ABRI di DPR RI mengalami penurunan jumlah anggotanya dari 75 menjadi 38 orang, dan 10% dari anggotanya di tingkat DPRD. Di samping itu, Jenderal Wiranto juga melakukan pemisahan polisi dari TNI. Pemisahan tersebut berimplikasi pada perubahan nama ABRI menjadi TNI. Dengan demikian TNI sekaligus memutuskan hubungan formalnya dengan *Partai Golkar*, dan bersikap netral pada pemilihan anggota parlemen di bulan Juni 1999.

TABEL IDENTIFIKASI REFORMASI MILITER INDONESIA 1998-1999

NO.	AGENDA REFORMASI	TAHUN	STATUS
1.	Penarikan personel militer aktif dari jabatan sipil	1998	Selesai
2.	Pemisahan TNI-Polri	1999	Selesai
3.	Menghilangkan peran militer dalam praktik politik formal	1999	Selesai
4.	Deklarasi netralitas politik militer dengan menarik diri dari Golkar.	1999	Selesai
5.	Pengorganisasian ulang Dephankam menjadi Dephan	1999	Selesai

6.	Penunjukan sipil sebagai Menhan	1999	Selesai
7.	Pemberdayaan parlemen vis-a-vis TNI	1999	Sebagian Selesai

Sumber: Alexander R. Wulan, *Satu Dekade Reformasi Militer Indonesia*, PACIVIS, Jakarta, 2008, hal. 66.

Tabel 2.1 Tabel Identifikasi Reformasi Militer Indonesia 1998-1999

Dari tabel di atas, *dalam* waktu yang demikian relatif cepat telah terjadi tujuh hal penting dari proses reformasi di tingkat ABRI/TNI selama periode 1998-99. Ketujuh hal tersebut bukanlah merupakan persoalan yang kecil, tapi ikut menentukan bahkan dapat dikatakan sebagai hal-hal yang mendasar yang akan menentukan realisasi kehidupan politik yang demokratis. Dapat dikatakan bahwa secara tegas dan konkrit penghambat-penghambat utama bagi beroperasinya politik sipil dan kehidupan politik yang demokratis sudah disingkirkan. Kini masalahnya, apakah pihak sipil dan terkait dengan kehidupan politik yang demokratis tersebut akan berjalan sesuai dengan ‘skenario demokrasi lengkap’, artinya seluruh komponen dari institusi-institusi demokratis tersebut akan berjalan secara optimal, termasuk pula perhitungan kualitasnya yang memadai dengan fungsi dan tugas dari lembaga-lembaga sosial politik tersebut. Ini berarti betapapun kecilnya harapan maupun perkiraan pihak AS maupun Barat umumnya yang meremehkan akan adanya reformasi TNI, ternyata tidak demikian halnya. Tabel di atas sekali lagi membuktikan bahwa TNI di bawah kepemimpinan Jenderal Wiranto turut mengawal ambisi Presiden B. J. Habibie untuk menempuh proses terwujudnya demokrasi lengkap di Indonesia. Sekaligus perkembangan tersebut memberikan indikasi bahwa baik para elit sipil-militer di Indonesia tidak menghendaki akan adanya campur tangan pihak asing (AS dan negara-negara Barat), menyangkut isu-isu reformasi yang bersifat internal.

'Reformasi awal' tersebut menunjukkan sikap TNI yang netral dalam kasus Pemilu 1999, sikap tersebut turut memuluskan kemenangan PDI-Perjuangan Megawati Sukarnoputri, dengan perolehan 33,7% dari total suara dalam pemilihan anggota legislatif. Hal ini sekaligus membawa Megawati sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden pada Oktober 1999. Namun akhirnya dalam pemilihan presiden yang ditempuh melalui proses pilihan oleh para anggota MPR ternyata dimenangkan oleh Abdurrahman Wahid atas Megawati dengan suara 373 terhadap 313. Dari proses tersebut dikabarkan agak terjadi ketegangan, karena ambisi Jenderal Wiranto yang berambisi untuk menjadi Wakil Presiden tidak disetujui oleh Presiden A. Wahid. Dalam hal itu, Megawati yang dipilih sebagai Wakil Presiden oleh Presiden A. Wahid. Namun kekecewaan pimpinan TNI dapat dikompensasikan dengan masuknya Susilo Bambang Yudhoyono dan Agum Gumelar dalam kabinet, dengan kedudukan masing-masing sebagai menteri. Dari kasus terpilihnya Presiden A. Wahid tersebut cukup menarik karena telah mematahkan mitos selama ini, bahwa menurut Marcus: *'you still can't become president in Indonesia without the military; some people say they're out of the bureaucracy, and all of that, but that's nonsense'*³³. Kendatipun pernyataan tersebut dapat dikatakan kontroversial, namun harus diakui bahwa bukan berarti TNI sudah demikian lemah pengaruhnya. Dalam kenyataannya TNI masih punya pengaruh kuat, namun manuver politiknya pada proses pilihan presiden tersebut tampaknya agak mengalami kesulitan untuk langsung dapat ikut menentukan sebagai 'pemain politik utama' yang menentukan. Kegamangan maupun ketidak-solidan antar para elit TNI masih menjadi gejala utama setelah mengalami proses reformasi yang cukup mendasar (1998/99).

Proses reformasi di tubuh TNI tersebut mengalami gangguan yang cukup serius, dengan keputusan Presiden B. J. Habibie yang menyerahkan propinsi Timor Timur melakukan referendum di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun proses tersebut tidak berjalan mulus, menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda (terutama jumlah total suara yang mendukung maupun tidak atas integrasi Timtim dengan Indonesia) baik

³³ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 205.

antar aktor-aktor di dalam negeri Indonesia maupun pihak asing. Akhirnya terjadilah perusakan dan bentrokan senjata antara pihak militia dan TNI, yang berakhir dengan pembumi-hangusan wilayah Timtim. Sejak akhir September 1999 Timtim tidak lagi merupakan propinsi Indonesia. Kebijakan Habibie tersebut menjadi kendala yang cukup serius dalam hubungannya dengan TNI secara keseluruhan, di mana sikap Habibie tersebut dianggap sebagai ‘penghianatan’ atas perjuangan TNI selama ini dalam menguasai Timtim, ‘*East Timor was Indonesian military territory*’.³⁴ Kasus Timtim ini pula tampaknya yang membuat hubungan Habibie dengan berbagai pihak di TNI menjadi renggang terutama menjelang akhir masa jabatannya.

2.3 Reformasi TNI dan Presiden A. Wahid, 1999-2001

Munculnya Presiden A. Wahid sebagai presiden Indonesia keempat, cukup mengejutkan atas perkembangan politik domestik Indonesia yang tampak ‘lebih bebas’ lagi dari hal-hal apa yang terjadi dan dialami oleh presiden sebelumnya (B. J. Habibie). Untuk kedua kalinya setelah Presiden Soeharto ‘*lengser*’, Indonesia dipimpin oleh dua presiden yang berlatarbelakang sipil dan non-militer. Ditambah pula, bahwa Presiden A. Wahid lebih mengutamakan wakilnya adalah Megawati Sukarnoputri yang juga berasal dari non-militer, bahkan di akhir-akhir kekuasaan Soeharto – Mega merupakan tokoh oposan terhadap Orde Baru yang cukup diperhitungkan. Kehadiran Presiden A. Wahid dan Wakilnya Megawati Sukarnoputri, menjadi pertanda baru bagi hubungan sipil-militer di Indonesia.

Kembali masalah reformasi TNI secara intern tidak saja merupakan tantangan serius bagi berakhirnya peran dwi-fungsi ABRI, tapi dibalik itu persoalan konsolidasi kepemimpinan di ABRI/TNI yang tidak selalu ‘homogen’ cukup memerlukan waktu bagi para jenderal TNI untuk berkiprah kembali di perpolitikan Indonesia. Namun kehadiran dua tokoh sipil di puncak kepemimpinan nasional Indonesia tampaknya sekaligus memberikan harapan baru pula. Intinya, Presiden A. Wahid akan lebih berani melakukan perubahan-perubahan karena selama ini presiden Indonesia yang keempat tersebut tidak punya ‘beban politik’, ataupun selama ini sebagai bagian dari

³⁴ *Ibid.*, hal. 208.

rejim Soeharto dan ABG-nya. Karena itu cukup beralasan dengan apa yang menjadi perspektif Marcus menyangkut Presiden A. Wahid tersebut yaitu; *'President A. Wahid appear to offer improved prospects for democratic consolidation in general and accelerated civil-military reforms in particular'*³⁵

President A. Wahid selanjutnya berupaya untuk meningkatkan pengaruhnya di kalangan TNI, terutama melakukan kontrol sipil terhadap terhadap para jenderal aktif di TNI. Dalam hal itu Presiden A. Wahid diluar 'kebiasaan' yang terjadi telah menunjuk Laksamana/Jenderal Widodo sebagai Panglima TNI yang baru. Hal tersebut merupakan kejutan pula bagi perwira militer yang setingkat dengan Jenderal Wiranto. Bahkan Presiden A. Wahid tampaknya langsung melaksanakan prinsip reformasi internal TNI yang telah disepakati di era Habibie, yaitu dengan menempatkan seorang sipil menjadi Menteri Pertahanan yang baru Prof. Dr. Juwono Sudarsono (2000).³⁶ Hal-hal lainnya yang juga dapat dikatakan cukup kontroversial dalam hubungan sipil-militer di Indonesia sebagai berikut; *'disbanded a military-coordinated security agency notorious for its political surveillance activities, and abolished the socio-political offices at the ministry of home affairs, a traditional military stronghold. In addition, President A. Wahid initiated negotiations with separatists in both Aceh and Papua, ignoring the warnings from conservative officers that only military force could quell the secessionist tendencies in the two conflict-ridden provinces. Wahid, it appeared, was determined to embark on a process of radical military reform and enforce civilian supremacy over the political sphere.'*³⁷

AS maupun negara-negara Barat umumnya menyambut gembira dengan hal-hal ataupun berbagai kebijakan reformasi yang bergulir lebih jauh lagi. Kekhawatiran AS tampaknya makin berkurang kalau dikatakan TNI selalu dan tetap merupakan kekuatan yang amat berpengaruh dibalik sistem politik Indonesia tersebut. Presiden A. Wahid juga melakukan kebijakan-kebijakan politiknya dalam hal 'menata kembali' hubungan sipil yang berada di atas tekanan pengaruh militer – tidak saja konsekuensi dari berbagai

³⁵ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 211.

³⁶ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 213.

³⁷ *Ibid.*, hal. 212.

perubahan yang sudah terjadi di era Presiden B. J. Habibie, tapi hal tersebut amat terkait dengan ambisi Presiden A. Wahid yang mengharapkan kehidupan demokrasi yang lengkap tidak saja dapat segera bergulir dengan cepat – di luar itu kehidupan politik yang benar-benar bersifat demokratis merupakan ‘*selling point*’ yang menarik bagi wajah baru Indonesia terhadap AS maupun negara-negara Barat umumnya.³⁸

Apa yang menjadi ambisi Presiden A. Wahid tersebut tampaknya ingin mengakhiri ‘dilema politik’ hubungan Indonesia dengan AS dan negara-negara Barat umumnya. Intinya, selama ini Indonesia selalu memakai atribut-atribut politik demokrasi, namun dalam realisasinya pemerintahan rejim Orde Baru Soeharto justru hanya menggunakan atribut-atribut tersebut sebagai alat politik semata untuk memperoleh bantuan dan pinjaman keuangan dari AS dan negara-negara Barat. Hal tersebut tampaknya merupakan hal-hal yang paradoks bagi keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia, misalnya Indonesia selama era Orde Baru adalah ‘*partner*’ dekat dari AS dan Barat – namun sistem politik yang hidup bersifat otoriter dan sekaligus didukung kuat oleh supremasi politik militer. Jelaslah pasca Mei 1998, tampaknya AS maupun negara-negara Barat umumnya amat mendukung kalau Indonesia dapat keluar dari dilema politik yang dibangun oleh rejim Soeharto selama ini.

Oleh sebab itulah hal-hal yang dilakukan Presiden A. Wahid cukup mendapat pujian. Dalam konteks itu Marcus menekankan; ‘*the replacement of several army generals who had risen to prominence under Suharto’s rule aimed at the very break with the New Order military that Habibie had not achieved. Wahid had identified Wiranto as the biggest obstacle to further military reform and therefore decided to destroy the latter’s patronage network spread throughout the TNI hierarchy*’³⁹. Konsekuensi dari hal-hal yang dilakukan Presiden A. Wahid telah menimbulkan faksi-faksi pengaruh di kalangan TNI. Dalam hal itu, Presiden A. Wahid tampaknya menjagokan Jenderal Agus Wirahadikusumah, yang dianggap dapat mengawal berbagai perubahan penting lainnya di tubuh TNI (termasuk masa depan dari struktur komando teritorial).

³⁸ Zainuddin Djafar (2006), *Op. Cit.*, hal.

³⁹ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 212.

Tekanan pemerintahan baru Presiden A. Wahid terhadap perubahan-perubahan yang perlu segera dilakukan oleh TNI, telah membuat perbedaan-perbedaan antara para jenderal TNI secara individual menjadi terbuka dihadapan publik. Ada tiga jenderal yang cukup berpengaruh pada akhir 1999 tersebut, yaitu Jenderal Wiranto berhadapan dengan Jenderal Prabowo, dan di luar kedua jenderal tersebut – ada pula Jenderal A. Wirahadikusumah yang sering disebut sebagai jenderal reformasi. Pernyataan-pernyataan Jenderal A. Wirahadikusumah dapat dikatakan sering amat kontroversial, dan benar-benar menginginkan suatu perubahan atau reformasi di tubuh TNI dengan cepat. Karena menurut anggapannya ABRI di masa Orde Baru telah ‘dikotori’ sebagai pemain dan sekaligus juga sebagai alat politik rejim yang berkuasa – hal-hal tersebut harus segera ditanggapi serius oleh siapa pun yang duduk sebagai pimpinan TNI, dan profesionalisasi militer akhirnya tidak dapat berbicara banyak dalam menghadapi berbagai perubahan eksternal yang demikian cepat dan di berbagai sektor kehidupan. Sosok Jenderal A. Wirahadikusumah amat berbeda isu-isu reformatifnya dengan Jenderal Wiranto maupun Jenderal Prabowo Subianto. Jenderal Wiranto sering disebut jenderal yang juga pro-reformasi tapi lebih konservatif sifatnya, dan Jenderal Prabowo Subianto sering disebut sebagai jenderal ‘garis keras’, dan cukup ambisius untuk menjadi pimpinan utama TNI maupun muncul di arena politik nasional.

Berbeda dengan kedua jenderal lainnya (Wiranto dan Prabowo) , pada prinsipnya Jenderal A. Wirahadikusumah menekankan sebagai berikut; *‘this is a new era, in the past an officer had to suck up to Suharto to get promoted and have influence, but now it is much more complicated. As a result of the extensive change since 1998, the politicians must like you, the media must like you, only then you’re a winne. The statements had made Wirahadikusumah soon found himself labelled as a ‘multi-media officer.’*⁴⁰ Presiden A. Wahid amat terkesan dengan sikap dan pernyataan-pernyataan Jenderal A. Wirahadikusumah, dan dapat pula jenderal tersebut sebagai ‘duet baru’ yang menggantikan Habibie-Wiranto dalam pemerintahan sebelumnya. Namun

⁴⁰ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 214.

Jenderal A. Wirahadikusmah ‘secara misterius’ dicopot dari posisinya (Agustus 2000),⁴¹ dan kemudian secara ‘misterius’ meninggal dunia, sehingga pentas politik Indonesia kehilangan seorang tokoh jenderal yang dapat dikatakan sebagai *a’multi-media officer* tersebut.

Hal-hal yang selanjutnya terkait dengan pengerucutan atau penyederhanaan sistem komando TNI dalam operasinya ke seluruh tanah air adalah target penting lainnya dari Presiden A. Wahid. Hal tersebut ditentang oleh banyak perwira TNI, karena dianggap secara teknis telah ikut campur terlalu jauh atas kepentingan dan wilayah militer – di mana hal tersebut dianggap dapat merusak sistem mekanisme TNI dan berbagai prosedur yang sudah baku dan ketat selama ini. Situasi tersebut telah menimbulkan konflik yang amat tajam antara presiden dengan pihak-pihak yang masih punya pengaruh kuat di TNI, sehingga muncullah reaksi TNI yang juga menentang Gus Dur, pada waktu terjadi konflik antara presiden dengan DPR (yang akan melakukan *impeachment* terhadap Presiden A. Wahid), menyangkut kasus ‘penggelapan’ penerimaan dana bantuan dari Perdana Menteri Brunei Darussalam.⁴²

Munculnya konflik serius antara pihak parlemen (politisi sipil umumnya) dengan Presiden A. Wahid, telah terjadi perubahan yang cepat pula atas isu reformasi yang progresif di tubuh TNI. Presiden A. Wahid langsung sebagai reaksi terhadap konfliknya dengan pihak-pihak di parlemen, Presiden A. Wahid melakukan semacam perubahan sikap drastis terhadap TNI. Hal ini sebagaimana juga disimpulkan oleh Marcus; *‘in the lead-up to the annual session of the MPR in August 2000, during which Wahid had to account for his ten months in office, the president was eventually forced to withdraw his support for Agus Wirahadikusumah and the reform ideas he represented. Wahid’s concession was designed to secure political backing from the armed forces mainstream, compensating for his dramatic loss of support from civilian groups in and outside the legislature. In a major gesture of*

⁴¹ *Ibid.*, hal. 217

⁴² Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 217.

*compromise directed at the generals, Wahid even agreed to delegate responsibility for internal TNI affairs to his deputy Megawati Sukarnoputri.*⁴³

Keputusan Presiden A. Wahid tersebut, menjadikan awal debut dari karier Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri untuk langsung berkecimpung dan menangani soal-soal internal dalam tubuh TNI. Hal ini dapat dikatakan sebagai suatu 'kejutan', bahwa presiden makin terdesak kedudukannya karena proses reformasi yang dilakukan terhadap TNI demikian progresif, dan sikap politiknya yang juga sering bersifat kontroversial terhadap berbagai lembaga pemerintahan (termasuk pada para anggota parlemen), akibat semua itu cukup mengacaukan posisi dan kedudukannya sebagai presiden RI keempat.

2.4 Megawati Sukarnoputri dan TNI

Keterlibatan Wakil Presiden Megawati yang langsung berkaitan dengan isu-isu di tubuh TNI, telah membuat dirinya populer di kalangan puncak pimpinan TNI maupun para perwira umumnya. Hal tersebut terutama terkait dengan prinsip nasionalistis yang dianutnya, dan munculnya gejolak frustrasi yang cukup intens di kalangan perwira TNI terhadap Presiden A. Wahid.⁴⁴ Megawati juga dengan cepat membaca situasi politik yang bernada *'ayo rame-rame singkirkan Presiden A. Wahid'* tersebut, *'she had joined forces with reform-sceptical officers June and successfully pushed for the dismissal of Bondan Gunawan, Wahid's state secretary and a close civilian ally of Wirahadikusmah. Shortly before the MPR session commenced, Wirahadikusmah himself was relieved of his Kostrad command and assigned to a desk job at TNI headquarters.*⁴⁵ Hal tersebut menjadi bukti bahwa mereka (para perwira pendukung Jenderal Wiranto maupun dari faksi lainnya) yang menentang pembaharuan drastis telah berhasil menggunakan konflik antara presiden dan lembaga legislatif, dan akibatnya reformasi TNI yang sifatnya progresif telah kehilangan momentumnya.

Peristiwa politik domestik disekitar persidangan MPR tahun 2000 menjadi pertanda kuat bahwa Presiden A. Wahid secara perlahan tapi pasti

⁴³ *Ibid.*, hal. 218.

⁴⁴ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 218.

⁴⁵ *Ibid.*

telah kehilangan dukungan dari para politisi sipil umumnya, termasuk sikap-sikap sebagian besar perwira TNI yang secara politis makin mempersulit untuk mempertahankan keberlanjutan kepemimpinan Presiden A. Wahid tersebut. Jelas situasi tersebut bukan saja menjadi tantangan bagi perubahan maupun agenda reformasi yang sudah dicanangkan sebelumnya, tapi agenda reformasi di tubuh TNI dapat dikatakan macet atau ‘tidak bergerak’. Sebenarnya reformasi yang dilakukan Presiden A. Wahid (dengan melakukan isolasi terhadap para perwira konservatif atas isu reformasi TNI secara efektif dan melanjutkan reformasi yang cepat di dalam tubuh TNI) cukup mendapat simpati dan dukungan politik dari para politisi sipil di lembaga DPR umumnya, namun pada akhirnya mereka pun para politisi tersebut harus berpikir panjang karena; *‘Wahid’s reform of the military is fine, we could all support him in that. But he continued how can we allow him to monopolize political power, humiliate parliament, ridicule political parties, place his cronies in state enterprises, and talk nonsense almost everyday?’*⁴⁶ Para perwira pendukung Jenderal Wiranto dan faksi lainnya di tubuh TNI telah memanfaatkan situasi politik tersebut, dengan menyerang berbagai reformasi yang dicanangkan oleh Presiden A. Wahid selama periode 1999-2000.

Presiden A. Wahid dilain pihak juga tampaknya berusaha keras melakukan antisipasi atas gerakan-gerakan politik yang makin memojokkannya, dan Presiden A. Wahid juga harus kembali membangun dukungan dari para politisi sipil. Situasi tersebut ditambah dengan keyakinan Presiden A. Wahid bahwa Ia berhasil menguasai ‘mayoritas politik di parlemen’ dan dukungan kembali dari TNI, maka pada akhir Agustus 2000 Presiden A. Wahid melakukan reshuffle kabinetnya dan tanpa berkonsultasi dengan Wakil Presiden Megawati. Dalam proses reshuffle tersebut Presiden A. Wahid lebih menekankan pada pilihan menteri-menteri barunya yang punya loyalitas pribadi dengan dirinya, serta punya motivasi politik yang dapat diandalkannya – maka Prof. Dr. Juwono Sudarsono sebagai Menteri Pertahanan diganti oleh orang dekatnya ‘Gus Dur’ sendiri, yaitu Mahfud MD. Dalam hubungan itu Presiden A. Wahid mengakui; *‘Mahfud had attracted his*

⁴⁶ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 219.

*attention not by his expertise in defence matters, but by being one of the few legal observers who publicly supported the president's claim to political supremacy over parliament. Mahfud's appointment also signalled a significant shift in Wahid's policy towards the military – from trying to radically reform it at the beginning of his term to using it as a tool in his escalating conflict with the political elite.*⁴⁷

Respon Presiden A. Wahid yang dilakukakannya dalam kurun waktu singkat tampaknya cukup dilematis. Di satu pihak Presiden A. Wahid mengharapkan dukungan politik yang dapat menguat kembali baik dari anggota parlemen umumnya, maupun para perwira tinggi di TNI, namun di lain pihak upaya 'gerilya politik' tersebut sudah tidak banyak artinya lagi. Pada saat itu para perwira TNI justru menjadi bingung, mengapa Presiden A. Wahid tampak berubah-ubah dalam kebijakan soal reformasi TNI dari yang tadinya bersikap radikal lalu kemudian menjadi 'kompromistis' tersebut. Ini menunjukkan bahwa Presiden A. Wahid sudah bertindak terlalu jauh, bertindak semau-maunya, dan dapat dikatakan tidak menghargai proses perubahan yang sudah dicanangkannya selama ini. Karena itu usulan presiden untuk menempatkan Jenderal A. Wirahadikusumah menggantikan Jenderal Tyasno Sudarto sebagai Panglima TNI mendapat resistensi pada Oktober 2000 dalam pertemuan para perwira TNI di Bandung, dalam konteks tersebut *'the meeting decided to reject Wirahadikusumah's promotion and appeal to Megawati for support. Her disenchantment with the August cabinet reshuffle was sufficiently deep for her to confront the president on the issue, and she eventually succeeded in preventing Wirahadikusumah's appointment. Tyasno however, was unable to secure his own political survival. In his place, the armed forces leadership managed to have Endriartono Sutanto appointed as army chief of staff.'*⁴⁸

Kembali dalam kasus Jenderal Wirahadikusumah dapat dikatakan tidak ada kekompakan antara presiden dan wakilnya, dan Megawati sering 'dilalui' begitu saja dalam hal kasus maupun masalah di TNI. Presiden A. Wahid tampaknya ingin mendominasi soal-soal berkisar di tubuh TNI, dan akibatnya

⁴⁷ *Ibid.* hal. 220.

⁴⁸ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 220.

Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri dapat dikatakan juga turut bermain melakukan manuver-manuver politik yang secara tidak langsung juga turut menguntungkan posisinya dihadapan perwira TNI umumnya. Intinya, dari kelemahan kebijakan Presiden A. Wahid terhadap TNI di satu pihak, tapi di lain pihak hal itu justru merupakan kekuatan bagi hubungan Megawati dengan TNI. Ini berarti kedua belah pihak (presiden dan wakilnya) sudah mencanangkan akan persaingan yang terbuka dan intensif memasuki akhir tahun 2000.

Memasuki Pebruari 2001 DPR menyampaikan memorandum yang akan melakukan *impeachment* terhadap Presiden A. Wahid, telah menimbulkan reaksi dari presiden sendiri yang merupakan ancaman-ancaman yang bersifat irasional. Sebagai contoh Presiden A. Wahid akan mengancam untuk membekukan peran lembaga legislatif, dan mengumumkan negara dalam keadaan darurat, serta akan menggunakan kekuatan TNI untuk mengeksekusi perintahnya.⁴⁹ Namun pihak TNI terutama pernyataan dari Jenderal Endriartono menekankan bahwa pihak TNI tidak akan menyetujui dengan perintah Presiden A. Wahid tersebut. Menurut Marcus; *'TNI leaders maintained that their opposition to the emergency decrees provided evidence for their 'consistency in implementing TNI's New Paradigm, its neutrality and non-involvement in practical and partisan politics and its refusal to be used as an instrument of power.'*⁵⁰

Tindakan oposisi pihak militer/TNI terhadap Presiden A. Wahid jelas merupakan pelajaran penting bagi siapa pun yang menduduki jabatan tertinggi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses reformasi di tubuh TNI tidak dapat dengan serta merta hanya mempertimbangkan hal-hal yang bersifat 'agenda-agenda teoritis, apalagi jika proses reformasi yang bersifat radikal dapat mengguncang seluruh anggota TNI. Ini akan membuat guncangan perubahan yang dahsyat dan membahayakan bagi hubungan sipil-militer secara menyeluruh. Seharusnya pihak sipil memberi contoh tauladan yang lebih baik terlebih dahulu dari peran-peran yang dilakukannya di tingkat pemerintah, dan baru kemudian minta TNI juga turut mendukung isu-isu

⁴⁹ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 221.

⁵⁰ *Ibid.*

perubahan yang juga harus dilakukannya. Akibatnya penilaian terhadap Presiden A. Wahid tidak demikian simpatik lagi pada tahun 2001, sebagaimana digambarkan oleh Marcus; *'they had previously celebrated him as a radical military reformer, but now they say he's worse than Suharto...., authoritarian, a dictator, and so on; its amazing.'*⁵¹

Harus diakui dari kasus Presiden A. Wahid tersebut, terlihat adanya persaingan maupun konflik antar elit politisi sipil dalam periode 2000-2001. Ini menyebabkan pihak TNI tampak sebagai pihak-pihak yang berperan secara individual baik melakukan transaksi politik maupun mendukung salah satu pihak (presiden maupun wakilnya) dalam pertarungan dengan pihak lainnya. Situasi tersebut telah menurunkan kredibilitas pihak sipil (presiden dan wakilnya), dan pooling pendapat justru menunjukkan bahwa pada periode September 2000 sampai dengan Oktober 2001 prosentase responden yang cenderung bersimpati dengan sikap politik TNI meningkat dari 28 menjadi 58%, dan bagi mereka yang selama ini berpandangan *unfavourable* mengalami penurunan dari 61 menjadi 31%.⁵² Dengan kasus 'persaingan' keras antar politisi sipil (terutama presiden dan wakilnya), telah menyebabkan secara tidak langsung pihak TNI umumnya menikmati keuntungan – menjadi lebih populer dan tetap perlu diperhitungkan kembali kredibilitas politiknya. Keberlangsungan persaingan politik di antara elit sipil tersebut, maka pesimisme pihak asing terhadap stabilitas politik Indonesia cukup beralasan sebagaimana dikemukakan sebagai berikut; *'the idea that the longernb the turmoil continues, the more Indonesians may come to see it as the last hope for stability'*.⁵³

Pada Mei 2001 persetujuan antara Presiden A. Wahid dengan pihak oposisi dari sebagian besar anggota parlemen berlanjut kembali, yang sekaligus menghancurkan reputasinya sebagai pembaharu demokrasi politik di Indonesia. Pada bulan yang sama itu DPR mengajukan kembali memorandum kedua yang menentang presiden, dan memanggil sidang MPR untuk melakukan *impeachment* terhadap Presiden A. Wahid. Menanggapi situasi

⁵¹ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 221.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, hal. 222.

tersebut, Presiden A. Wahid kembali menggunakan pengaruh politiknya memilih Chaeruddin dan mengganti Kapolri Bimantoro. Namun sekali lagi pihak Kapolri Bimantoro menolak dan membangkang kalau yang bersangkutan harus meninggalkan kantornya.⁵⁴ Dalam kasus tersebut; *Bimantoro refused to leave office, and parliament continued to view him as the legitimate head of the police. With neither side showing any will to compromise, the constitutional conflict between the presidential office and parliament over the issue further aggravated political tensions.*⁵⁵

Pada puncak dari krisis hubungan President A. Wahid dan pihak-pihak di parlemen, ribuan pendukung presiden yang fanatik secara politik dan keyakinan agamanya didatangkan dari Jawa Timur ke Jakarta untuk mempertahankan kedudukannya dari tuntutan *impeachment*. Di samping Presiden A. Wahid mencoba untuk mengalienasikan Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri berada dalam ‘satu front’, namun hal itu tidak mudah terjadi. Tampak dari situasi Presiden A. Wahid yang berada di ujung tanduk kekuasaannya, Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri justru tidak menghambat siapapun yang akan menjatuhkan Presiden A. Wahid – tapi justru Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri seperti membiarkan saja ke arah mana bola politik akan bergulir, dan hal tersebut tentunya lebih menguntungkan kepentingan politik Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri. Tentunya kalau sampai Presiden A. Wahid berakhir kekuasaannya, maka hal tersebut adalah kesempatan yang amat baik bagi Megawati Sukarnoputri untuk tampil sebagai orang nomor satu di Indonesia. Marcus tampaknya juga mendukung analisis tersebut, antara lain; *‘Megawati his last ally of President A. Wahid on 18 July 2001 met with leading figures of the opposition and declared that a special session of the MPR was unavoidable. Megawati had taken a lot from [Wahid], including the treachery in 1999, but when he led the country on a dangerous path of constitutional conflict, threats of mass violence, and abolition of democratic institutions, a line had been crossed.*⁵⁶

⁵⁴ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 222.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

Dalam konteks itu dapat dipahami bahwa tidak ada teman maupun lawan yang abadi dalam suatu kehidupan politik maupun hal-hal dalam hubungannya yang bersifat politik, yang jelas ada dan bersifat abadi adalah kepentingan politik dari masing-masing pihak. Situasi hubungan antar elit politik sipil yang masih demikian kuat tersebut (saling menjatuhkan), dan dari kasus July 2001 menunjukkan bahwa tidak mudah untuk menegakkan hubungan sipil-militer yang mencirikan ketauladan dalam berbagai hal terutama dari satu pihak (sipil) kepada militer. Yang justru terlihat dan bahkan Wakil Presiden Megawati pun turut ‘meramaikan’ arena politik yang lebih mengutamakan ‘prospek’ kekuasaannya, daripada ikut dalam permainan politik Presiden A. Wahid yang justru akan dapat mengancam karier politiknya. Reaksi Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri jelas telah memberikan hasil konkrit, yaitu membawa dirinya sebagai pengganti Presiden A. Wahid dan orang nomor satu di Indonesia.

Konflik antara Presiden A. Wahid dan pihak-pihak di TNI tampaknya demikian serius, beberapa perwira yang dipromosikan (seperti Johny Lumintang untuk pos wakil panglima TNI, dan Chaeruddin sebagai Kapolri), telah ditolak oleh Jenderal Endriartono (KASAD) – dan menganggap hal-hal tersebut adalah cara agar TNI dapat diajak bergabung dan melawan MPR. Karena itu Jenderal Endriartono minta Widodo (Panglima TNI) untuk menolak promosi Lumintang tersebut.⁵⁷ Presiden A. Wahid amat marah dengan reaksi dari pihak-pihak TNI tersebut. Ini berarti pula upaya terakhir Presiden A. Wahid untuk merangkul TNI di bawah pengaruhnya makin hilang kesempatannya.⁵⁸

Menanggapi sulitnya mencari dukungan ‘politis’ dari pihak TNI, Presiden A. Wahid akhirnya mengancam pihak TNI, bahwa massa pendukungnya yang berjumlah satu juta orang akan mengepung kompleks dan gedung MPR dan menyelamatkan dirinya dari hilangnya jabatan presiden yang masih didudukinya. Presiden A. Wahid tetap mengancam Jenderal Endriartono yang akan dipecat dan juga dipenjarakan – begitu pula terhadap perwira TNI lainnya yang berupaya menghentikan gerakan ‘sejuta umat

⁵⁷ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 223.

⁵⁸ *Ibid.*

Wahid' tersebut.⁵⁹ Namun ancaman Presiden A. Wahid memang hanyalah sebuah ancaman saja,, karena 'sejuta umat NU-nya Wahid' tidak pernah datang ke Jakarta, dan proses *impeachment* (ketidak-percayaan politik) di MPR tetap berjalan, dan tanpa ada hambatan yang berarti.

Pihak TNI dalam hubungan itu memberikan jaminan keamanan bahwa Presiden A. Wahid dengan para pembantu terdekatnya dapat meninggalkan istana kepresidenan. Jenderal Ryamizard Ryacudu yang menjadi pimpinan Kostrad diminta untuk menempatkan pasukannya di depan istana, dan melindungi presiden dari gangguan keamanan maupun serbuan para pemrotes. Presiden A. Wahid tampaknya tetap salah paham dengan perkembangan tersebut, dan yakin kalau Jenderal Ryamizard tidak sepaham dengan perwira TNI lainnya, sehingga jenderal tersebut akan berada dalam satu kubu menentang MPR. Intinya, *'the troops at the palace were not intended to strengthen Wahid.s political position but to ensure the safety of the presidential compound. The generals rejected Gus Dur's last-ditch attempt to save himself by staging a Sukarno-style coup against the MPR. On 23 July 2001, the military and police faction in the MPR voted with most of the other parties to oust Wahid from office and appoint Megawati as his successor.'*⁶⁰ Tamat riwayat Gus Dur sejak akhir July 2001 tersebut, dan proses berakhirnya kekuasaan tersebut telah secara konkrit menempatkan Megawati Sukarnoputri sebagai presiden Republik Indonesia yang baru.

Jatuhnya kursi kepresidenan A. Wahid telah membawa situasi yang cukup chaos bagi perkembangan sistem politik Indonesia setelah era transisi pasca pemerintahan otoriter Orde Baru. Banyak peristiwa maupun kebijakan politik yang demikian radikal yang dilakukan oleh Gus Dur, diikuti dengan konflik yang demikian besar di antara elit pemerintahan, sehingga Ia meninggalkan suatu proses 'konflik dan konsensus politik' yang mengancam eksistensi atas konsolidasi demokrasi, serta hubungan sipil-militer yang aman dan damai.⁶¹ Namun di samping itu pemerintahan Presiden A. Wahid juga meninggalkan kebijakan-kebijakan politik yang dapat dikatakan bersifat

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 224.

⁶¹ *Ibid.*

inovatif yang belum terealisasi sebelumnya oleh pemerintahan manapun. Dalam konteks itu Presiden A> Wahid menawarkan kesepakatan baru dengan gerakan separatis di Aceh dan Papua, serta perubahan yang demikian luas di tubuh TNI (lihat tabel di bawah ini). Namun Gus Dur juga sering menebarkan ancaman yang bernada keras dan sepihak terhadap lawan-lawan politiknya, serta tidak pernah merasa adanya keganjilan karena telah menggunakan berbagai fasilitas negara bagi kepentingan kelompoknya.⁶²

**TABEL IDENTIFIKASI REFORMASI MILITER DI INDONESIA,
TAHUN 2000**

NO.	AGENDA REFORMASI	TAHUN	STATUS
1.	Pembekuan doktrin Dwi Fungsi	2000	Selesai
2.	Pendefinisian pertahanan eksternal sebagai fungsi utama TNI	2000	Selesai
3.	Menghapus bagian sosial-politik di Depdagri	2000	Selesai
4.	Pembekuan Bakorstanas	2000	Selesai
5.	Penetapan undang undang tentang HAM	2000	Selesai

Sumber: Alexandra R. Wulan (2008), *Op. Cit.*, hal. 66.

Tabel 3.1 Identifikasi Reformasi Militer Di Indonesia 2000

Dari tabel tersebut dapat dilihat adanya 5 identifikasi agenda reformasi militer yang berhasil direalisasi oleh pemerintahan Presiden A. Wahid, dan semua agenda tersebut telah dapat diselesaikan hanya kurang lebih dalam satu tahun (pada tahun 2000). Hal-hal tersebut yang tampaknya diistilahkan oleh Marcus et all, bahwa agenda reformasi yang dilakukan Gus Dur menyangkut kehidupan TNI cukup demikian, luas, radikal, dan dalam tempo yang cukup singkat (satu tahun).⁶³ Di samping itu juga ada 2 keputusan MPR pada tahun 2000 yang juga berhasil dibuat, yang mendefinisikan tugas-tugas militer yang

⁶² Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 224.

⁶³ *Ibid.*

eksklusif dan fokusnya pada pertahanan saja, dan masalah keamanan internal akan ditangani oleh polisi.⁶⁴ Pada keputusan MPR yang sama juga telah diputuskan secara final bahwa faksi TNI di DPR berakhir pada tahun 2004, dan untuk tingkat MPR pada tahun 2009 (sebagai batas akhir).⁶⁵ Jelas dari keputusan tersebut, Presiden A. Wahid cukup berani untuk terus menggulirkan suatu reformasi militer yang memutus langsung ‘tali politik’ kepentingan militer di parlemen. Ini juga berarti bahwa kekuatan politik militer selama ini di parlemen, dan menjadi alat politik rejim Orde Baru cepat atau lambat telah berakhir.

Keberhasilan Gus Dur dalam hal agenda reformasi militer di Indonesia kendatipun diikuti dengan berbagai ‘hiruk-pikuknya’ perpolitikan di tingkat domestik Indonesia, maupun berbagai kebijakan yang kontroversial (termasuk upaya Gus Dur memecah belah TNI, serta bermaksud membubarkan parlemen), namun ‘prestasi’ reformasi militernya itu tidak dapat diabaikan. Lebih jauh kelebihan Presiden A. Wahid dalam hal reformasi militer di Indonesia menurut Marcus; *‘Wahid encouraged intensive civil society participation in the drafting of a new State Defence Bill, designed to replace the web of New Order laws that had legitimized the military’s political role. Such high levels of civil society engagement in deliberating defence legislation are typically found in post-authoritarian states that have already begun the second generation of civil-military reforms. That it was achieved in Wahid’s Indonesia made his self-inflicted failure all the more tragic and regrettable.’*⁶⁶

2.5 Megawati dan Para Jenderal TNI, 2001-04

Jatuh atau berakhirnya kekuasaan Presiden A. Wahid sebagai presiden Republik Indonesia ke-empat telah memberikan beberapa implikasi penting terhadap hubungan sipil dan militer, serta terkait dengan proses transisi demokrasi politik. Pengaruh militer khususnya para kalangan perwira di TNI angkatan darat meningkat kembali dan secara proporsional sekaligus terjadi eskalasi konflik yang cukup intens dengan pihak elit sipil yang menduduki jabatan puncak (presiden). Kasus-kasus yang muncul pada 2 era kepresidenan

⁶⁴ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 224.-225.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

dalam hal pola konflik tersebut berbeda satu sama lain, misalnya dalam kasus Presiden B. J. Habibie konflik tersebut masih dapat dikatakan bersifat kelembagaan.

Proses kelembagaan harus mengalami reformasi awal yang cukup mendasar dan sekaligus harus dikawal oleh TNI sendiri, dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Karena perkembangan dan hubungan sipil-militer terutama menyangkut perlunya peningkatan peran politik *civil-society* di Indonesia telah menjadi sorotan maupun ‘kalkulasi’ politik bagi AS maupun negara-negara Barat akan eksistensinya. Intinya, perkembangan demokrasi politik ala Orde Baru tidak dapat ditolerir kembali. Namun di era Presiden A. Wahid, amat kental sekali bahwa Gus Dur menghendaki perubahan atas hubungan sipil-militer yang cukup radikal dan drastis. Ini telah menimbulkan konflik langsung antara Presiden A. Wahid dengan pribadi-pribadi jenderal TNI. Konflik tersebut tidak hanya sekedar perdebatan saja, tapi sudah mengarah pada konflik ‘aksi-reaksi’ yang saling mengancam satu sama lain. Akibatnya, masa jabatan Presiden A. Wahid mengalami distorsi dukungan yang meluas, tidak hanya di kalangan TNI saja tetapi pada kasus penggelapan dana bantuan dari Brunei telah menempatkan pihak politisi sipil di parlemen dan TNI berada dalam satu kubu, dan sama-sama ingin mengakhiri masa jabatan A. Wahid sebagai presiden Republik Indonesia yang ke-empat.

Konteks tersebut juga tidak lepas dari masih besarnya ‘kompetisi kekuasaan’ di kalangan elit sipil sendiri, misalnya hal tersebut ditekankan oleh Marcus; *‘protracted tension and competition among civilian political forces and elites that compromised the bargaining position of the civilians vis-a-vis TNI. However, Wahid’s rule concurred that although there was a formal commitment to ending military engagement in politics, the requirements of real politics forced civilian politicians to be pragmatic and seek support from TNI...’*⁶⁷ Apakah kasus-kasus yang terjadi di era Presiden B. J. Habibie dan A. Wahid dalam hal hubungan sipil-militer akan terulang kembali pada era Presiden Megawati Sukarnoputri? Tampaknya presiden kelima tersebut akan banyak belajar dari kasus-kasus tersebut, terutama dalam hubungannya dengan

⁶⁷ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 225.

para jenderal di TNI, maupun dalam konteks hubungan sipil-militer khususnya.

Peran utama dari pihak militer dalam perjuangan mereka menghadapi Wahid tampak jelas dan masih terpusat pada kekuatan TNI sendiri sebagai institusi yang diajukan, misalnya berbagai isu yang mengancam kedudukan para jenderal tertentu – maka isu tersebut diangkat sebagai ancaman bagi TNI secara keseluruhan. Dalam proses perubahan dari sistem politik yang otoriter ke arah demokratis, tampaknya masih sulit bagi TNI untuk terlalu berharap pada para kolega jendralnya yang duduk di kabinet, maupun pada mereka yang masih duduk *sebagai* anggota parlemen. Kepentingan-kepentingan para jenderal di TNI yang bersifat mendasar (otonomi internal, dan manajemen keuangan yang tidak dicampuri pihak luar), masih demikian elementer dan tidak dapat digantikan oleh pihak-pihak lain. Marcus menekankan; *‘for the generals, the circumstance provided evidence that the shift from autocratic to democratic rule had not significantly undermined their ability to protect TNI’s core interests, such as its internal autonomy and financial self-management.*⁶⁸ Karena itu Marcus juga amat yakin bahwa dalam periode transisi dan termasuk bagi masa era kepresidenan Megawati Sukarnoputri; *‘neither incumbent governments nor oppositional groups could afford to alienate the armed forces, with both sides constantly approaching military leaders to recruit them for their cause. Whatever the outcome of political conflicts was, the armed forces were certain to profit from them.*⁶⁹

Kendatipun Presiden Megawati Sukarnoputri dapat belajar banyak dari proses transisi politik dan pemerintahan di era Presiden B. J. Habibie maupun Presiden A. Wahid, namun proses hubungan sipil-militer tersebut ke arah yang bersifat *reformatif* tidaklah merupakan hal yang mudah. Dapat dikatakan di era pasca Mei 1998, kondisi TNI makin hari makin ‘terdesak’ dalam banyak hal, maka wajarlah kalau sejak Mei 1998 mereka pun melakukan perhitungan atau kalkulasi politik yang matang. Hanya persoalannya tida mudah bagi siapapun di TNI untuk menghentikan era perubahan ataupun reformasi yang memang harus terjadi atas hubungan sipil-militer tersebut.

⁶⁸ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 225.

⁶⁹ *Ibid.*

Walaupun seperti apa yang ditekankan oleh pendapat Marcus di atas, bahwa pihak-pihak TNI akan selalu berusaha mengambil keuntungan apa saja dari suatu perubahan di era reformasi tersebut, namun bagi TNI bukan berarti segala sesuatunya berjalan mulus dan dapat dikontrol sepenuhnya oleh pihak-pihak di TNI. Karena ada satu hal yang menjadi sorotan dan perhatian lainnya yang juga diperhitungkan oleh mereka yang berada di TNI – yaitu peran, pengaruh, dan kepentingan AS dan negara-negara Barat yang masih konsisten untuk membantu dan menjadi partner pembangunan bagi Indonesia tidak mudah untuk dikesampingkan. Intinya, pihak AS maupun Barat pun tidak mau lagi untuk kedua-kalinya hanya dijadikan alat kepentingan rejim yang berkuasa dengan mengatasnamakan ancaman ini atau itu. Faktor eksternal itulah yang tidak mudah lagi dikontrol maupun dikuasai oleh TNI dan militer Indonesia umumnya. Tidak seperti pada era Orde Baru, kini dapat dikatakan tidak mudah bagi TNI untuk menjual isu-isu apa yang menarik sehingga pihak AS maupun Barat akan netral dalam proses reformasi TNI tersebut. Jelas situasi tersebut merupakan hal yang dilematis bagi TNI, namun bagi pihak sipil sendiri tidak dapat bertindak semaunya. Karena dapat dikatakan pasti ada ‘ruang/koridor’ antara sipil dan militer bahwa suatu isu reformasi harus dapat dikatakan ‘positif’ bagi kedua-dua pihak – tidak hanya sekedar menekan TNI saja dan tanpa ada ‘tauladan sosial-politik’ yang dapat dijadikan panutan baginya.

Presiden Megawati Sukarnoputri dalam hubungannya dengan reformasi hubungan sipil-militer tampak mempunyai hal-hal yang bersifat ideologis, dan berbeda dengan para presiden pendahulunya. Pihak TNI sendiri secara tidak langsung cukup positif terhadap kehadiran Megawati Sukarnoputri sebagai presiden Indonesia yang baru (2001-04), sehingga konsolidasi di TNI sejak 2001 menjadi awal reaksi yang justru yakin bahwa pemerintahan yang baru akan mempunyai pendekatan yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Presiden A. Wahid maupun Presiden B. J. Habibie.

Mengapa banyak pihak di TNI punya keyakinan yang demikian, yaitu mereka melihat Presiden Megawati Sukarnoputri akan membawa angin segar bagi keberlanjutan perubahan di TNI maupun dalam hubungan sipil-militer.

Ini disebabkan; *'in their view, Megawati's political conservatism, her preoccupation with the territorial integrity of the state, and her indifference to intellectual discussions on human rights and individual freedoms made her a natural ally for conservative military officers. For example pointed to Megawati's conservative populism, which envisaged the armed forces presiding as guardian of her relationship with the people, and Sidney Jones even referred to Megawati as a 'sort of a mascot' of the armed forces.*⁷⁰

Ada tiga hal yang perlu digarisbawahi dari apa yang menjadi penekanan kebijakan Presiden Megawati Sukarnoputri tersebut, yang telah dianggap memberikan angin segar bagi TNI serta prospek hubungan sipil-militer di Indonesia. Pertama, tampak jelas peran politik Megawati sebagai Wakil Presiden di era Presiden A. Wahid berhasil melepaskan dirinya dari 'permainan' ambisi politik presiden pada saat itu. Megawati tampaknya membatasi dirinya untuk tidak menerima begitu saja kebijakan-kebijakan Presiden A. Wahid terhadap TNI maupun aspek reformasinya yang dianggap banyak pihak cukup radikal.

Kedua, karena itu Megawati tidak mau membenarkan Presiden A. Wahid dalam kasus-kasus promosi jabatan para perwira TNI yang bersifat individual, atau bahkan promosi yang sifatnya menjadi 'tameng' dari kepentingan politiknya menghadapi pihak-pihak pembangkang di TNI – yang tidak mau memperkuat kubu Wahid menghadapi *impeachment* dari pihak parlemen. Ketiga, tampak jelas dalam kasus kedudukan Megawati Sukarnoputri sebagai wakil presiden lebih banyak menarik jarak dari hiruk-pikuknya berbagai kebijakan Presiden A. Wahid menyangkut hubungan sipil-militer yang bersifat kontroversial tersebut. Oleh sebab itu banyak pihak cukup yakin banyak Megawati Sukarnoputri telah berhasil memanfaatkan kelemahan-kelemahan kebijakan Gus Dur tersebut, dan sekaligus memanfaatkannya untuk mempermudah jalan Megawati menuju kursi presiden atau orang nomor satu di Indonesia. Apakah Megawati akan banyak belajar dari kasus-kasus hiruk-pikuknya hubungan sipil-militer pada masa lalu (1998-2000), tampaknya menarik untuk dibahas dan dievaluasi lebih jauh?

⁷⁰ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 226.

Dukungan dan simpati yang kuat dari banyak jenderal maupun perwira tinggi di TNI terhadap Megawati Sukarnoputri, menyebabkan kehadirannya sebagai penguasa baru belum tentu dapat memuluskan reformasi hubungan sipil-militer sebagai kelanjutan dari era masa lalu. Hal tersebut bukan saja merupakan tantangan yang serius, tapi dapat juga sebagai kemungkinan tampilnya kembali TNI di arena politik nasional. Pihak-pihak di AS maupun negara-negara Barat tentunya amat khawatir dengan perkembangan tersebut. Ini berarti proses reformasi tidak berjalan mulus maju ke depan, tapi dapat mengalami gelombang maju-mundur dan tantangan bagi kehadiran demokrasi lengkap sebagaimana diharapkan kehadirannya bagi Indonesia baru pasca 1998.

Kekhawatiran pihak-pihak di Barat tersebut cukup beralasan, karena kedekatan Presiden Megawati maupun simpati yang besar terhadap hal-hal yang bersifat nasionalistis dari banyak kalangan perwira di TNI, dan pandangan-pandangannya yang dinilai masih terbatas menyangkut situasi internasional pasca krisis Asia.⁷¹ Perubahan tatanan dunia yang demikian kompetitif dalam hal ekonomi-politik menuntut penyesuaian lebih jauh dalam hal kebijakan politik-keamanan. Kebijakan-kebijakan menyangkut politik keamanan perlu lebih efektif – dalam hal anggaran dan penggalangan kerjasama yang perlu diintensifkan dalam mengatasi berbagai kerawanan situasi regional dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara – baik hal tersebut ditempuh melalui mekanisme regional ASEAN atau secara bilateral.

Megawati diharapkan tidak perlu mendramatisir persoalan-persoalan politik domestik dan terkait dengan soal-soal reformasi TNI terlalu jauh. Hal tersebut akan terlalu banyak menyita perhatian, sehingga dapat mengabaikan berbagai perkembangan isu-isu politik keamanan yang lebih hebat tantangan dan kepentingannya bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut perlu dipertimbangkan dengan makin meningkatnya isu-isu keamanan yang bersifat ancaman langsung terhadap setiap warga Indonesia, dalam hal gempa bumi, ancaman degradasi lingkungan yang serius (banjir, tanah longsor, tsunami, dan lain-lain), penyakit endemik yang mematikan bagi manusia maupun

⁷¹ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 226.

binatang. Ini berarti pula Megawati perlu memberi kesadaran penuh pada siapapun bahwa mempolitisir soal-soal keamanan hanya untuk mempertahankan kepentingan pihak tertentu di TNI jelas akan menjadi masalah dan tantangan yang baru dalam menghadapi isu-isu keamanan tersebut.

Marcus tampaknya sependapat dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, lebih jauh pandangannya; *Megawati's ascension to power in July 2001 was seen as a watershed in civil-military relations, marking the return of the armed forces into the political arena and the end of military reforms. Despite Megawati's ideological and political affinity to the officer corps, however, her worldview alone is insufficient to explain the stagnation, and partial regression, in military reform efforts.*⁷²

Di samping itu Marcus juga menekankan bahwa perlu disadari akhirnya oleh siapa pun yang berkuasa di Indonesia kalau suatu reformasi kebijakan politik-keamanan dalam hal hubungan sipil-militer tersebut perlu mempertimbangkan; *'the reform was mainly a combination of structural factors, both domestic and international, that changed the civil-military equation under Megawati's rule in favour of the armed forces. The origins of some of these factors lay in the political patterns of the pre-Megawati polity; while others reflected broader societal and even global change.'*⁷³ Dari ulasan Marcus tersebut, jelaslah kalau faktor Megawati akan menentukan dan bahkan punya peran penting bagi keberlanjutan proses reformasi TNI dan hubungan sipil-militer di Indonesia.

Salah satu faktor penting yang menjadi awal kebijakan Presiden Megawati Sukarnoputri terhadap TNI, adalah jaminan bahwa soal-soal internal (dalam hal promosi jabatan para perwira, dan otonomi manajemen keuangan) tidak akan diintervensi tanpa persetujuan secara timbal balik. Presiden Megawati Sukarnoputri melihat bahwa TNI sebaiknya tidak dipolitisir untuk kepentingan politiknya menghadapi pihak-pihak lain di arena politik nasional Indonesia. Karena itu lebih baik pihak-pihak yang menduduki

⁷² Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 226.

⁷³ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 226.

jabatan puncak dan para jenderal yang berpengaruh tersebut dirangkul oleh Presiden Megawati Sukarnoputri, agar eksistensinya sebagai penguasa nomor satu di Indonesia tidak mengalami nasib yang sama seperti di era Presiden A. Wahid.

Di samping itu Presiden Megawati Sukarnoputri juga berpandangan positif dengan eksistensi TNI pada umumnya, menurut Marcus; *'Megawati viewed the military as an effective life insurance against a possible betrayal by parliament and the parties that dominated it. In extending more privileges to the armed forces, she continued and accelerated a trend started under the previous government'*.⁷⁴ Bahkan Megawati menurut Marcus lebih jauh lagi merangkul pihak-pihak di TNI; *'determined to keep the armed forces on her side, Megawati expanded these concessions to include greater institutional autonomy and increased influence on security affairs.'*⁷⁵

Sebagai konsekuensi dari 'perangkulan' seoptimal mungkin terhadap sebanyak mungkin pihak-pihak di TNI, maka pada tahun 2000 Presiden Megawati Sukarnoputri melakukan reshufel besar-besaran di tubuh TNI – terutama mengganti perwira-perwira yang dianggap menentang rencana reformasi militer bagi para elitnya. Dalam hubungan itu Jenderal Endriartono Sutanto yang selama ini dikenal sebagai pihak yang amat kuat mempertahankan kepentingan militer tidak dipertahankan oleh Presiden Megawati Sukarnoputri. Karena itulah; *'Megawati supported the promotion of Ryamizard Ryacudu to the position of army chief of staff. Ryamizard was known for his conservative ideological views and his stern rejection of the concept of civilian supremacy, making him politically controversial but popular with the army mainstream.'*⁷⁶ Yang menarik dari apa yang menjadi pertimbangan Presiden Megawati Sukarnoputri dalam soal mutasi untuk jabatan KASAD (Kepala Staf Angkatan Darat) tersebut, yaitu adanya perubahan prioritas bagi TNI – di mana Presiden Megawati Sukarnoputri tampaknya lebih menekankan perlunya pimpinan KASAD yang lebih moderat

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 226-227.

dalam hal reformasi internal TNI – daripada terjadinya perubahan yang cukup radikal dalam hal hubungan sipil-militer. Ini berarti pula perlunya eksistensi supremasi sipil yang tidak disukai oleh Jenderal Ryamizard Ryacudu akan mengalami disorientasi untuk sementara. Apakah hal tersebut benar-benar akan menjadi prioritas Presiden Megawati Sukarnoputri, atau justru faktor Ryamizard Ryacudu dilihat olehnya dari sisi yang lain, dan adanya faktor lain yang lebih menentukan – misalnya sebagai ‘orang yang amat dipercaya’?

Presiden Megawati Sukarnoputri selanjutnya melakukan pengurangan otoritas departemen pertahanan sebagai institusi eksekutif utama dalam melakukan pengawasan terhadap TNI. Untuk itu jabatan menteri pertahanan juga mengalami pergantian, dan ‘teman dekatnya’ pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Matori Abdul Djalil menduduki pos tersebut. Kembali kalau dilihat dari kasus Matori tersebut di samping Ia mempunyai jasa dalam ikut mempermudah jatuhnya mantan Presiden A. Wahid dalam kasus *impeachment* oleh pihak parlemen, Ia pun dilihat oleh Presiden Megawati Sukarnoputri sebagai orang yang dapat dipercaya. Apalagi Matori Abdul Djalil juga dapat dikatakan sebagai korban dari kasus *impeachment* mantan Presiden A. Wahid tersebut, di mana Matori setelah kasus tersebut dipecat sebagai pimpinan PKB. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan dari pandangan Marcus; *‘Megawati chose Matori Abdul Djalil, who had just lost the chairmanship of PKB over his involvement in Wahid’s impeachment and was therefore without any significant political support base.’*⁷⁷

Kendatipun terlihat dari pandangan Marcus tersebut, Presiden Megawati mempunyai kepentingan politik sendiri dalam kasus Matori tersebut, namun kredibilitasnya tidak sebaik dari menteri pertahanan sebelumnya (Prof. Dr. Juwono Sudarsono). Karena itu apa yang perlu dilakukan Matori Abdul Djalil yaitu; *‘lacking knowledge of the conceptual and technical aspects of military affairs, Matori sought to compensate for his deficiencies by driving a course of accommodation towards the military elite.’*⁷⁸ Dalam suasana reformasi TNI dan hubungan sipil-militer mendapat sorotan baik dari pihak-pihak di dalam negeri maupun secara eksternal, keputusan

⁷⁷ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 227.

⁷⁸ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 227.

menunjuk Matori Abdul Djalil sebagai menteri pertahanan yang baru jelas merupakan kelemahan dan kebijakan yang memprihatinkan – dan sebaiknya tidak terjadi. Karena jabatan tersebut amat memerlukan keahlian dan visi yang luas, tidak dipertaruhkan hanya untuk kepentingan ‘suksesi politik’ di tingkat domestik. Namun Matori Abdul Djalil akhirnya mengalami stroke pada Agustus 2003, dan selama sakitnya itu dapat dikatakan peran menteri pertahanan yang dijabatnya menjadi tidak efektif, dan jabatan tersebut juga tidak mengalami pergantian kembali sampai masa jabatan Presiden Megawati berakhir pada akhir 2004.

Ada dua implikasi penting dari tidak efektifnya jabatan menteri pertahanan (2002-03) tersebut, yaitu; *‘not surprisingly, the military expressed satisfaction with the fact that it had no civilian oversight body to report to for an extended period of time, reminding it of the convenient arrangement under the previous regime when the TNI commander often had simultaneously held the position of minister of defence. The prolonged vacancy in the department at defence highlighted Megawati’s disengagement from details of military management throughout her rule.’*⁷⁹ Hal-hal tersebut dapat menjadi citra yang kurang menguntungkan bagi Presiden Megawati Sukarnoputri dari penilaian pihak-pihak di tingkat internasional (AS dan negara-negara Barat khususnya). Intinya, seandainya terjadi gangguan keamanan yang demikian serius, dan peristiwa yang berindikasikan ancaman teror yang hebat – maka sudah dipastikan dari ‘kasus Matori’ tersebut akan bergulir suatu evaluasi bahwa wajarlah kalau Indonesia dapat dikatakan makin tidak aman atas terjadinya ancaman terorisme internasional.

Ideologi Presiden Megawati yang dianggap banyak pihak sebagai ‘amat’ nasionalistis dibandingkan dengan dua pendahulunya (Habibie dan A. Wahid), telah menjadi harapan banyak pihak di tingkat domestik bahwa penanganan stabilitas keamanan yang memihak pada kepentingan nasional d yang kredibel dan tetap pada koridor persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia harus dapat diimplementasikan di wilayah Indonesia Timur (kasus Poso, Ambon, dan sebagian besar wilayah Maluku). Presiden Megawati

⁷⁹ *Ibid.*

Sukarnoputri tampaknya memang tidak sabar dengan perkembangan keamanan yang tidak menentu di wilayah Indonesia Timur tersebut – apalagi menyangkut gerakan-gerakan separatisme (termasuk di Aceh dan Papua) yang melakukan pembunuhan semena-mena dan tidak berperikemanusiaan..

Hal-hal tersebut harus dapat segera dihentikan, dan tindakan maupun kebijakan masa lalu dari dua presiden pendahulunya (Habibie dan A. Wahid), yang dianggap banyak pihak terlalu lemah atau melalui mekanisme dialog yang sering amat berkepanjangan – sehingga banyak korban sudah berjatuh – harus ditinggalkan. Ini menyebabkan ; *'this made Megawati renewed prioritization of territorial integrity and repressive methods of conflict resolution favoured the armed forces in many ways. Most importantly, it restored the military's claim to a domestic security role and returned the armed forces to the centre of policy-making in areas affected by separatist movement and communal conflict'*.⁸⁰

Peran dan perlunya ketegasan intervensi militer di tingkat domestik tampaknya tidak dapat dihindari lagi. Peristiwa di Indonesia Timur dengan berbagai eksese dan implikasinya yang mengerikan tersebut tampaknya tidak dapat lagi menyerahkan segala persoalan keamanan tersebut hanya mengandalkan peran polisi, karena tingkat ancamannya *tidak* hanya mengerikan tapi kredibilitas pemerintah amat dipertarukan. Kalau hal-hal tersebut dibiarkan, dan proses 'pembersihan etnis' salaing terjadi secara timbal balik antar satu pihak dengan pihak – jelas hal tersebut akan dapat mengundang keterlibatan pihak asing. Karena pihak asing tidak dapat membiarkan suatu 'pembersihan etnis' berjalan terus dan berlaku terus – tanpa ada solusinya. Ini menyebabkan; *'in Maluku the military assumed overall responsibility for security operations from the police in May 2002, after the joint command between the two forces had been unable to stop the religious violence that was devastating the province since 1999'*.⁸¹

Begitu pula dengan gagalnya permintaan atas deklarasi '*martial law*' di Maluku, dan daerah-daerah konflik lainnya di berbagai wilayah lainnya – maka perkembangan tersebut telah semakin menegaskan kembali perlunya

⁸⁰ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 227.-8.

⁸¹ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 228.

peran militer (TNI) di tingkat *domestik* sebagai perihal yang tidak dapat dielakkan. Dalam hal itu maka konstelasi tetap perlunya peran militer sebagai ‘penjaga utama’ bangsa dan negara yang pernah diragukan oleh keputusan MPR tahun 2000, tampaknya perlu ditinjau kembali. Bahkan menurut Marcus; ‘*even foreign observers now agreed with the rationale that ‘nationwide domestic disorder’ raises the question of whether there is an appropriate domestic security role for TNI.*’⁸²

Hal-hal tersebut makin menunjukkan bahwa konsep NKRI (Negara Kesatuan Republik *Indonesia*) bukanlah masalah yang sederhana, apalagi jika konsep tersebut dikaitkan dengan soal-soal keamanan, dan aspek stabilitas politik keamanannya. Kesadaran semua pihak baik pihak-pihak elite sipil maupun militer tidak dapat melihat masalah keamanan secara partial, misalnya apakah penanganan keamanan lebih menguntungkan siapa? Ini memberikan arti bahwa dengan kembalinya TNI langsung menangani soal-soal keamanan, tentunya diharapkan tidak mengurangi hal-hal yang terkait dengan ‘plus-minus-nya’ wajah militer/ABRI di masa Orde Baru, misalnya saja karena alasan keamanan – maka apapun dapat dilakukan oleh pihak-pihak di aparat keamanan. Hal tersebut tampaknya perlu direvisi dengan berbagai perkembangan baru, terutama dengan tuntutan dominan masyarakat yang melihat hal-hal yang bersifat transparan, manusiawi, dan kerjasama yang kondusif antara TNI dan masyarakat luas. Dalam konteks itulah situasi keamanan dalam penanganannya akan jauh lebih baik, dan punya arti besar bagi bangsa dan negara.

Hal-hal yang *menyangkut* konsep NKRI setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru (Mei 1998) dapat dikatakan tidak menjadi prioritas pemerintahan Habibie maupun Gus Dur, dan pihak TNI sendiri tidak mudah untuk mengingat kembali pentingnya konsep NKRI dilihat secara luas. Dalam upaya TNI menolak situasi tersebut dan perlunya kembali dilakukan atas pembelaan terhadap konsep NKRI, maka; ‘*the uncompromising defence of*

⁸² *Ibid.*

*NKRI emerged as the core element of TNI's newly defined mission in the post Suharto state.*⁸³

Dalam hubungan itu kasus-kasus gerakan separatisme yang makin hebat dan subur tumbuhnya telah memberikan keberuntungan sendiri bahwa banyak pihak akhirnya sadar persoalan mempertahankan integritas wilayah dan kesatuannya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Marcus juga menekankan; *'amidst separatist threats and religio-ethnic conflicts, the goal of defending the territorial integrity of the unitary republic did not only appeal to conservative officers, but quickly attracted interest and support from the wider public.*⁸⁴ Konsekuensi dari perkembangan pemikiran soal NKRI yang sebelumnya terbatas di tingkat para sebagian anggota TNI, ternyata hal tersebut mempunyai arti yang luas dan menyebar menjadi isu-isu yang hangat di kalangan kehidupan para masyarakat sipil umumnya, termasuk para politisi di partai-partai, dan para pejabat pemerintah, media massa, serta organisasi-organisasi masyarakat sipil umumnya. Selanjutnya, mereka umumnya mengintegrasikan terminologi NKRI sebagai ucapan yang populer dalam kehidupan politik sehari-hari.⁸⁵

Isu-isu menyangkut NKRI tersebut menjadi tema politik utama yang menguntungkan posisi dan kedudukan militer/TNI pasca Mei 1998. Intinya, dengan isu-isu tersebut dan sejak 2002 TNI mempunyai 'legitimasi' politik baru dan dianggap oleh Marcus serta para pengamat asing umumnya; *'the issue of NKRI was probably the military's most successful public relations campaign after 1998.*⁸⁶ Hal tersebut memungkinkan TNI untuk mempertahankan keberlanjutan klaim perannya yang kredibel di tingkat politik pemerintahan, dan realisasi reformasi yang berorientasi pada kesatuan negara.

Mengingat isu-isu NKRI demikian penting karena perkembangan gerakan separatisme di berbagai wilayah Indonesia (terutama wilayah Indonesia Timur) tidak kunjung padam. Sebagai akibatnya, maka mayoritas

⁸³ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 228.

⁸⁴ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 228.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

politisi di parlemen sepakat bahwa reformasi TNI yang dapat mengurangi peran TNI untuk menangkap para pemberontak separatis harus ditunda dulu -- demi integrasi wilayah Indonesia yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal tersebut mendapat perhatian dari pengamat asing dengan mengacu pada pandangan politisi di komisi I DPR RI; *'it is now not the time to play around with military reform – and now is the time to support our military in their fight against separatists, also in their fight to safeguard the territorial integrity of Indonesia. They believed that we will be able to resume the reform effort in the future.'*⁸⁷ Dalam hal itu para politisi di parlemen tampak lebih progresif dibandingkan dengan apa yang menjadi kebijakan Presiden Megawati yang berkepentingan bahwa pihak militer/TNI tidak mengulang kembali prinsip *'traditional military paradigms of violent conflict resolution.'*⁸⁸

Selama tahun 2002, dan awal 2003 Presiden Megawati Sukarnoputri mengizinkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Susilo Bambang Yudoyono untuk mencari solusi terbaik dalam mewujudkan implementasi perdamaian atas problema Aceh melalui perundingan yang dimediasikan melalui Henry Dunant Centre di Geneva, Swiss. Proses tersebut tampaknya tidak berjalan mulus, kecurigaan baik dari pihak parlemen Indonesia maupun pihak-pihak di TNI tampak masih cukup dominan – terutama melihat upaya perdamaian hanya akan menguntungkan pihak-pihak pemberontak di Aceh. Pihak TNI ternyata juga melakukan sabotase atas perjanjian menyangkut masa gencatan senjata yang seharusnya dipatuhi oleh Indonesia pula – ternyata kesepakatan tersebut diabaikan, dan tetap terjadi penyerangan ke kubu para pemberontak Gerakan Aceh Merdeka.⁸⁹ Hal tersebut menyebabkan rencana inisiatif perdamaian di Aceh gagal pada May 2003.

Sebagai akibat dari kasus May 2003, Presiden Megawati Sukarnoputri kembali memberlakukan hukum darurat (*martial law*), dan kebijakan operasi militer kembali dilakukan. Pihak-pihak di parlemen terutama dari kunjungan kerjanya di Aceh merasa amat puas dengan kembalinya dilakukan operasi

⁸⁷ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 229.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 229

militer di wilayah Aceh sekitarnya, terutama dengan indikasi banyaknya berkibar bendera Merah-Putih di berbagai tempat. Karena itu para politisi di parlemen pada Agustus 2003 memberikan persetujuannya atas dana anggaran tambahan bagi operasi militer di wilayah Aceh tersebut, kendatipun hal tersebut diikuti dengan kritik tajam dari pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.⁹⁰ Kebijakan yang dilakukan DPR tersebut tampaknya ‘tidak obyektif’, karena hanya mempertimbangkan laporan-laporan dari pihak militer, dan sulit bagi pihak masyarakat sipil untuk melakukan verifikasi atas signifikansinya suatu operasi militer tersebut.

Tidak hanya kasus Aceh saja, tapi peristiwa *Nine-Eleven* 2001 yang turut meningkatkan ancaman terorisme di Indonesia (kasus Bom Bali I, dan II), adalah suatu ‘amunisi baru’ bagi para Jenderal TNI atas tetap perlunya struktur komando teritorial yang bebas dari isu reformasi. Pihak asing dan masyarakat pada umumnya harus pula kompromi dengan kenyataan; *‘adding to the public fear of separatism, communal violence, and national disintegration, the issue of terrorism was certain to serve as a new and effective disincentive against dismantling TNI’s power base in the regions.’*⁹¹

2.6 Pemilihan Umum 2004

Presiden Megawati Sukarnoputri pada awalnya tampak optimis bahwa Pemilu 2004 sebagai kelanjutan dari Pemilu 1999 di era reformasi, dan sekaligus melakukan pilihan langsung terhadap calon-calon presiden yang diajukan partai-partai politik akan adalah logis bahwa popularitasnya tetap menonjol. Karena selama periode 2001 sampai dengan sebelum pemilu 2004 Presiden Megawati Sukarnoputri cukup yakin dengan citra politiknya yang dapat dikatakan masih mendapat dukungan kuat dari para pendukungnya (PDI-P), dan bahkan hubungannya yang dekat dengan militer/TNI – Presiden Megawati Sukarnoputri dijuluki sebagai ‘mascot’ dari TNI,⁹² maka optimisme Presiden RI ke lima tersebut sebagai presiden yang akan terpilih kembali adalah cukup beralasan.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 232.

⁹² *Ibid.*, hal. 235.

Situasi menjelang pemilu 2004 tampaknya berbeda kondisinya bagi umumnya para jenderal TNI baik yang masih aktif maupun tidak aktif lagi, mereka umumnya agak pesimis karena pilihan langsung terhadap presiden dapat memperkecil probabilita para calon presiden dari mantan jenderal TNI. Hal tersebut mengingat tekanan citra negatif semasa Orde Baru yang dikhawatirkan akan tetap punya pengaruh menjelang pemilu 2004. Namun perkiraan tersebut tidak seluruhnya benar, karena citra TNI sejak 2001 makin positif. Ini disebabkan berbagai persoalan bangsa menyangkut konflik komunal, gerakan separatisme, ancaman terorisme yang semuanya itu dapat membahayakan integrasi NKRI – maka citra mantan jenderal sebagai calon presiden ataupun menduduki jabatan-jabatan politis tetap menjadi dambaan masyarakat. Intinya, minat masyarakat umumnya atas pemimpinnya yang berlatarbelakang anggota TNI tidak terlalu bermasalah. Marcus menilai hal tersebut; *‘Many Indonesians now (2004) favoured a president with a military background, reversing the trend of the early post-authoritarian period that had pointed to deep suspicions against officers in top political posts.’*⁹³

Pandangan masyarakat tersebut memberikan implikasi sebagai berikut; pertama, para jenderal konservatif di TNI yang tidak menyukai suatu reformasi seperti, *reforming the territorial command structure, and self financial management,*⁹⁴ menjadi cukup optimis bahwa peran politik mereka di masyarakat luas tidak mudah diabaikan. Kedua, berbagai ancaman keamanan yang cukup serius telah membuka kesempatan besar bagi peran politik mantan jenderal TNI di pemilu 2004.

Pada prinsipnya, masyarakat pada akhirnya juga perlu mempertimbangkan kembalinya sosok pemimpin yang berlatarbelakang militer – demi jaminan keamanan dan stabilitas politik bagi bangsa dan negara umumnya. Ketiga, konteks dan posisi para mantan jenderal TNI tersebut jelas punya 2 implikasi bagi keberlanjutan kepemimpinan Presiden Megawati Sukarnoputri pasca 2004; *‘(A). The struggle for executive positions in the regions, and (B), the preparations for the 2004 elections.’*⁹⁵

⁹³ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 232.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

Dua catatan menyangkut prospek kepemimpinan Megawati tersebut menunjukkan bahwa pihak sipil termasuk peran politiknya selama 2001-04 belum memberikan keyakinan yang cukup besar pada masyarakat bahwa era bangkitnya kepemimpinan sipil di Indonesia jauh lebih baik dan dapat dikatakan siap melakukan '*problem solving*'. Ternyata dari berbagai kritik yang ada justru kepemimpinan sipil pada 2001-04 bukan saja terjadi 'saling intrik, dan menjatuhkan' di antara mereka – tetapi juga peran mereka justru menjadi pencipta masalah-masalah batu. Ini menyebabkan bahwa para mantan jenderal TNI tidak mengalami kesulitan dalam melanjutkan kepemimpinannya untuk dua kali masa jabatan gubernur seperti (Jenderal Bintang Tiga Sutiyoso untuk Jakarta, Letnan Jenderal Mardiyanto untuk Jawa Tengah, dan Letnan Jenderal Imam Utomo untuk Jawa Timur, dan lain-lain).⁹⁶

Dari uraian di atas dan dalam konteks reformasi hubungan sipil-militer, tampaknya para jenderal dan pihak-pihak lainnya di TNI telah cepat melakukan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi. Mereka tampaknya tidak tertarik lagi memaksakan keinginannya dan mengganggu proses perubahan yang ada (kalau mereka mau, tentunya hal tersebut dapat dilakukannya – mengingat kekuatan politik mereka masih cukup solid). Tapi apa yang telah dilakukan mereka adalah membiarkan proses perubahan terutama menyangkut isu-isu reformasi tetap berjalan sesuai kemana 'arahnya tersebut' mengalir. Ternyata masyarakat cukup bijaksana dalam penilaiannya bahwa menjelang pemilu 2004 hal tersebut masih tetap terbuka pada elite militer/TNI untuk mengadu nasib mereka dalam pesta demokrasi tersebut.

Kritik maupun protes memang ada dari para mahasiswa umumnya yang menghendaki para mantan jenderal TNI tidak terlibat dalam pemilu 2004. Namun kritik maupun protes tersebut tidak bergaung, mengingat masyarakat umumnya tetap melihat faktor SDM, kemampuan manajemen, latar belakang pendidikan, kecakapan dalam hal kepemimpinan, dan pengalaman di pemerintahan adalah hal-hal yang menjadi tolok ukur penting bagi mereka yang akan menduduki jabatan presiden Indonesia. Hal-hal tersebut tampaknya menurut Marcus menjadi tantangan dan kelemahan bagi

⁹⁶ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 233.

Megawati Sukarnoputri misalnya; *Megawati had simply lost much of the trust that voters had put in her in 1999, having established a reputation for being aloof, inactive, intellectually and technically incapable, and out of touch with the concerns of a socially and economically troubled populace.*⁹⁷

Konsekuensinya dari perkembangan tersebut, Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dapat mengalahkan Megawati Sukarnoputri dalam pilihan presiden pada putaran kedua dengan margin suara yang cukup besar, yaitu 60,9 berbanding 39,1%. Kemenangan SBY untuk sementara dapat dikatakan berakhirnya masa transisi Indonesia, dan setelah enam tahun kini hubungan sipil-militer memasuki tahap baru – yaitu era konsolidasi demokrasi, dan disebut sebagai fase baru dari hubungan sipil-militer. Bagaimanapun juga situasi tersebut dapat dikatakan sebagai faktor positif bagi kepemimpinan Presiden Megawati Sukarnoputri, terutama dengan kebesaran hatinya mengantarkan Indonesia ke fase politik baru dengan tampilnya kembali pemimpin yang berlatar belakang militer – seperti SBY. Ini juga berarti bahwa Megawati kendatipun terlihat ada kesan ‘sulit berdamai’ dengan SBY, namun Megawati tampak menerima segala sesuatunya dengan baik – dan menerima dengan apa yang pilihan mayoritas masyarakat. Kendatipun kemenangan SBY dapat dikatakan sebagai kejutan, namun selama periode kepemimpinan Presiden Megawati Sukarnoputri telah dicapai beberapa reformasi penting menyangkut TNI dan hubungan sipil-militer sebagaimana terungkap dalam tabel di halaman berikut.

TABEL IDENTIFIKASI REFORMASI MILITER 2002-2004

Agenda Reformasi	Tahun	Status
Penerapan Undang-Undang tentang pertahanan negara	2002	Selesai
Penerapan Undang-Undang tentang TNI	2002	Selesai
Penarikan anggota militer dari parlemen	2004	Selesai
Penarikan fraksi ABRI dari MPR	2004	Selesai

⁹⁷ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 235.

Subordinasi peradilan militer ke dalam Mahkamah Militer	2004	Selesai
--	------	---------

Sumber: Alexandra Wulan (ed, 2008), *Op. Cit.*, hal. 66-67.

Tabel 4.1 Identifikasi Reformasi Militer 2002-2004

Dari tabel tersebut di atas ada 4 agenda reformasi yang telah seluruhnya diselesaikan pada era kepemimpinan Megawati Sukarnoputri pada 2002-04, dan satu agenda khususnya menyangkut subordinasi peradilan militer ke dalam Mahkamah Agung barulah sebagian selesai. Di samping itu tampaknya masih banyak agenda reformasi militer di Indonesia yang sampai tahun 2007 belum dapat diselesaikan, antara lain masih ada 15 isu (revisi koter, pengurangan anggaran off-budget bagi militer, subordinasi Mabes TNI terhadap Dephan, pengadilan sipil untuk bagi pelanggaran anggota militer yang sedang tidak bertugas, penguatan pengadilan HAM, sipilisasi karyawan Dephan, pembentukan DKN di bawah pimpinan sipil, kendali penuh pemerintah dan parlemen atas anggaran militer, pemeriksaan efektif terhadap pengeluaran militer, kaji ulang lintas institusional berkala tentang situasi ancaman dan struktur militer, sistem peradilan militer yang kredibel dan transparan, proses pengadaan peralatan militer dilakukan secara berlapis dan profesional, ketundukan birokrasi militer terhadap keputusan eksekutif, dan keberadaan komunitas sipil di bidang pertahanan.⁹⁸ Melihat dari bobot agenda reformasi yang belum dapat diselesaikan dengan tuntas tersebut di satu pihak, namun di lain pihak hampir semua agenda tersebut sudah mendapat peninjauan – dalam arti statusnya masih dalam proses, dan ada pula agenda yang masih memerlukan waktu untuk mendapat perhatian dari TNI dan pemerintah (presiden).⁹⁹ Kendatipun demikian harus diakui bahwa ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri dalam melakukan kontrol efektif terhadap proses reformasi militer memang sulit untuk dielakkan. Hal tersebut juga menjadi salah satu kesimpulan Marcus sebagai berikut; *‘Megawati finally showed little inclination to exercise strong control over the armed forces, which was due to a mixture of*

⁹⁸ Alexander Wulan (ed. 2008), *Op. Cit.*, hal. 67-68.

⁹⁹ *Ibid.*

*disinterest, political pressure, and genuinely felt sympathy for the military's nationalist ideology.*¹⁰⁰ Yang penting dalam kaitan itu perlu dipahami pula bahwa masalah reformasi militer/TNI bukanlah perihal yang sederhana, tapi memang diperlukan bobot pelaksanaan dan proses reformasi yang tanggap, serius, dan konsisten. Hal tersebut yang nampaknya menjadi tantangan lainnya bagi pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri.

Selanjutnya, berdasarkan perkembangan reformasi TNI di era kepemimpinan Presiden Megawati Sukarnoputri tersebut (2001-04), terdapat beberapa hal yang tampaknya perlu digarisbawahi bagi ciri hubungan sipil-militer di Indonesia. (1). Harus diakui bahwa TNI telah kehilangan cukup banyak hak-hak istimewa secara institusional dibandingkan pada era Orde Baru, dan sekaligus menjadi target dari kritik publik yang kadang sering diekspresikan secara sinis. Dimungkinkannya pihak-pihak sipil melakukan kritik tajam (kasus-kasus ABRI hanya sebagai alat politik Orde Baru Soeharto dan keluarganya) maupun 'adanya' peran kontrol terhadap TNI, situasi tersebut dapat dikatakan sebagai hal yang baru bagi peran politik sipil sejak periode 1950-an.¹⁰¹ (2). Namun, pihak-pihak di TNI sendiri juga berhasil mencegah campur tangan pihak sipil yang bersifat terlalu jauh terhadap soal internal TNI, sebagai contoh; *'military managed to maintain enough of its political weight to shield itself from legal investigations into past abuses and prevent radical cuts into its territorial power base.'*¹⁰² (3). Dapat disimpulkan pula bahwa pihak militer/TNI pun ternyata di era Megawati juga berhasil mempertahankan kepentingannya – terhindar dari reformasi yang terlalu jauh dan mengakhiri beberapa kepentingan utamanya (perampangan struktur komando, dan pengaturan keuangan secara internal). Banyak pengamat melihat hal tersebut karena selama era Megawati – reformasi di TNI dapat dikatakan stagnan, dan ini yang menyebabkan pula pihak-pihak di TNI (para jenderal umumnya) kembali mempunyai kekuasaan terhadap masyarakat dan negara, sehingga TNI pada 2003-04 tidak berarti telah kehilangan kekuasaan

¹⁰⁰ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 242.

¹⁰¹ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 240.

¹⁰² *Ibid.*

dan pengaruhnya. Kendatipun kekuasaan maupun pengaruh politik (2003-04) tidak sebanding ataupun sama dengan kondisi peran dan pengaruh TNI di era Orde Baru. Dalam hal itu Marcus memberikan ulasannya; *'the stagnation of military reform under Megawati's presidency – in fact inclined to highlight the military's continued powers rather than its significant loss of control over the state and society.'*¹⁰³

Sekali lagi dari pandangan Marcus tersebut, timbul kesan maupun citra yang cukup dominan di kalangan pengamat asing bahwa reformasi militer/TNI (era Megawati, 2001-04) dapat dikatakan kurang memuaskan, terutama jika pandangan tersebut dibandingkan dengan 2 era kepresidenan sebelumnya (Habibie, dan A. Wahid). Di satu pihak ekspresi pandangan tersebut tidak dapat sepenuhnya menjadi kesalahan maupun kelemahan kepemimpinan Presiden Megawati Sukarnoputri. Karena dilain pihak, Megawati menilai bahwa reformasi militer/TNI tidak mudah dilakukan selama pihak-pihak sipil dan para politisinya juga tidak melakukan introspeksi maupun ketauladanan yang dihormati masyarakat, maka rakyat umumnya dapat menilai bahwa pihak sipil (yang juga banyak terlibat dalam kasus KKN) tidak bedanya dengan pejabat di era Orde Baru.

Di samping itu Megawati juga berkepentingan bahwa suatu reformasi militer/TNI tidak menjadi ancaman berkurangnya legitimasi politiknya terhadap TNI itu sendiri. Namun yang lebih penting dari itu semua, pihak-pihak di TNI tampaknya selama periode 1998-2004 berupaya keras memperbaiki citra dan pengaruhnya di masyarakat. Marcus dalam hal ini mengakui hal tersebut; *'the high levels of intra civilian conflict between 1998 and 2004 allowed the armed forces to repair their image, request concessions from incumbent governments, and protect their institutional interests from further reform.'*¹⁰⁴

Akhirnya di atas semua itu, memang tampaknya turunnya kredibilitas berbagai institusi politik (di era transisi), merupakan faktor penting lainnya yang juga turut membuat TNI pada 2004 kembali memperkuat posisinya sebagai pengaman integritas wilayah dan negara kesatuan Indonesia.

¹⁰³ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 240.

¹⁰⁴ *Ibid.* hal. 241.

Bagimanapun juga hal-hal yang menyangkut reformasi militer/TNI dan perlunya suatu hubungan sipil-militer yang memperkuat tonggak-tonggak demokrasi ‘lengkap’ di Indonesia memang menjadi harapan banyak pihak, termasuk pula bagi AS dan negara-negara Barat umumnya. Intinya, *‘after the resignation of President Soeharto, the US and other Western countries had endorsed more reforms for the armed forces (TNI). This made the restrictions on equipment purchases and educational exchanges hardened the resolve of conservatives officers and fuelled anti-Western sentiments in the military mainstream.’*¹⁰⁵

Dalam konteks besarnya perhatian dari pihak AS dan negara-negara Barat tersebut, maka pada bab selanjutnya akan dibahas lebih jauh yaitu; bagaimana selanjutnya prospek dukungan AS dan reaksi kebijakan luar negeri Presiden Megawati Sukarnoputri menyangkut reformasi hubungan sipil-militer khususnya.

¹⁰⁵ Marcus Mietzner (2009), *Op. Cit.*, hal. 378.